

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI BENGKULU 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI BENGKULU 2023



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI BENGKULU 2023

Katalog : 4102002.17
Nomor Publikasi : 17000.24007

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xx+80 halaman

Penyusun Naskah : BPS Provinsi Bengkulu

Penyunting : BPS Provinsi Bengkulu

Pembuat Kover : BPS Provinsi Bengkulu

Penerbit : ©BPS Provinsi Bengkulu

Sumber Ilustrasi : *freepik.com*

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu.

<https://bengkulu.bps.go.id>



TIM PENYUSUN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
PROVINSI BENGKULU 2023

Pengarah:

Ir. Win Rizal, M.E.

Penanggung Jawab:

Teuku Fahrulriza, S.Si., M.E.

Penyunting:

Teuku Fahrulriza, S.Si., M.E.

Aff Afandi, SST, M.Si.

Nur Iman Taufik, SST

Elya Sumarni, S.E.

Hendri, SST, M.Si.

Pengolah Data dan Penulis Naskah:

Wina Prima Nurmala, SST, M.Si.

Nurtia, SST

Penata Letak:

Nurtia, SST

Kata Pengantar

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator capaian pembangunan kualitas hidup manusia masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup (AHH) saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu 2023 disusun untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Bengkulu pada tahun 2023. Publikasi ini juga disajikan dalam bentuk analisis spasial menurut kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang bertujuan untuk mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antar daerah. Dengan demikian, diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan publikasi ini di masa yang akan datang. Semoga publikasi ini bermanfaat, baik bagi pemerintah, akademisi, peneliti, dan masyarakat.

Bengkulu, Maret 2024
Kepala BPS Provinsi Bengkulu


Ir. Win Rizal, M.E.

ABSTRAKSI

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dirumuskan dan diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). UNDP menegaskan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia sejatinya menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, sekaligus menjadi input pembangunan.

Ide dasar pembangunan manusia berfokus pada dua hal, yakni manusia dan kesempatan. Artinya, pembangunan manusia harus berfokus pada peningkatan kualitas kehidupan yang dijalani oleh masyarakat dibandingkan hanya mengandalkan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan secara otomatis meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, pembangunan manusia pada prinsipnya memberikan lebih banyak kebebasan pada manusia untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, diharapkan pembangunan manusia mampu mengembangkan kemampuan manusia dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggunakan kemampuannya yang dimilikinya.

Aspek pembangunan manusia didasarkan pada tiga dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Capaian pembangunan manusia diukur dengan menggunakan beberapa indikator yang mewakili ketiga aspek tersebut. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili dengan indikator harapan hidup saat lahir, dimensi pendidikan diwakili dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi penguasaan sumber daya yang dibutuhkan untuk kehidupan yang layak didekati dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Kemajuan pembangunan manusia dapat dilihat dari dua perspektif, yakni pencapaian pembangunan manusia dan kecepatan perubahannya. Capaian yang lebih besar menggambarkan kondisi pembangunan manusia yang lebih baik. Sementara itu, kecepatan menunjukkan besarnya perubahan pembangunan manusia yang dicapai dalam satu tahun.

Mulai tahun 2020, penghitungan nilai IPM menggunakan indikator umur harapan hidup saat lahir (UHH) berdasarkan data hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Secara umum, nilai IPM Provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. IPM Provinsi Bengkulu tahun 2023 mencapai 74,30 meningkat dibanding tahun 2022 yang sebesar 73,68. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan IPM Provinsi Bengkulu sebesar 0,71 persen, mengalami peningkatan menjadi 0,84 persen pada tahun 2023. Sementara itu, berdasarkan pengelompokan status wilayah menurut nilai IPM nya, Provinsi Bengkulu berada pada status pembangunan manusia dengan kategori “tinggi”.

Secara nasional, IPM Provinsi Bengkulu tahun 2023 masih berada di bawah IPM Indonesia yang sebesar 74,39. Pertumbuhan IPM Provinsi Bengkulu dan Nasional pada tahun 2023 sama-sama tumbuh sebesar 0,84 persen. Pada tahun 2023 IPM Provinsi Bengkulu berada pada urutan ke-15 dari 34 provinsi di Indonesia dan urutan ke-6 dari 10 provinsi di Pulau Sumatera.

Pada tahun 2023, UHH di Provinsi Bengkulu mencapai 73,11. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata bayi yang lahir pada tahun 2023 diharapkan dapat bertahan hidup hingga usia 73,11 tahun. Perkembangan UHH saat lahir dari tahun 2020 sampai 2023 terus meningkat, rata-rata tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun. Dari dimensi pengetahuan yaitu harapan lama sekolah (HLS) pada tahun 2023 adalah sebesar 13,74 tahun. Artinya anak berusia tujuh tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 13,74 tahun atau mencapai pendidikan setara Diploma I. Sementara itu, rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2023 adalah sebesar 9,03 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk 25 tahun ke atas di Provinsi Bengkulu telah menempuh Pendidikan hingga 9,03 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP. Adapun dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita, mencerminkan

kemampuan masyarakat untuk membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Rata-rata pengeluaran masyarakat Provinsi Bengkulu tahun 2023 mencapai 11,17 juta rupiah per kapita per tahun, meningkat sebesar 3,06 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan daya beli masyarakat yang semakin meningkat.

Selain capaian pembangunan manusia yang tinggi, pemerataan pembangunan antar wilayah juga harus ditingkatkan. Disparitas capaian antar wilayah tercermin dari capaian IPM antar wilayah yang berbeda signifikan. Di Provinsi Bengkulu, terlihat adanya ketimpangan pembangunan manusia antara Kota Bengkulu dengan kabupaten lainnya. Kota Bengkulu merupakan wilayah dengan IPM tertinggi, yakni sebesar 83,38. Bersama Kabupaten Rejang Lebong dengan IPM sebesar 74,43, menjadikan IPM kedua wilayah tersebut diatas IPM Provinsi Bengkulu yang sebesar 74,30. Sementara itu, Kabupaten Seluma merupakan wilayah dengan IPM terendah di Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 70,27. Situasi ini karena Kota Bengkulu dengan IPM tertinggi tidak terlepas dari statusnya sebagai ibu kota Provinsi Bengkulu. Sementara Kabupaten Rejang Lebong sebagai daerah yang cukup maju karena termasuk wilayah lama di Provinsi Bengkulu. Fasilitas yang lebih lengkap memberikan kemudahan dan peluang lebih besar mendapatkan akses kesehatan, pendidikan dan perekonomian sehingga berdampak pada capaian pembangunan manusia yang lebih tinggi.

Dari sisi umur panjang, UHH tertinggi terdapat di Kota Bengkulu yang mencapai 74,43 tahun sedangkan UHH terendah sebesar 72,26 tahun di Kabupaten Kepahiang. Dari sisi pendidikan, Kota Bengkulu juga mendapat peringkat pertama dimana HLS nya mencapai 16,06 tahun dengan RLS sebesar 12,86 tahun. Terakhir dari sisi standar hidup layak, Kota Bengkulu juga menjadi wilayah dengan pengeluaran per kapita per tahun tertinggi sebesar 14,92 juta rupiah sedangkan wilayah dengan pengeluaran per kapita per tahun terendah adalah Kabupaten Seluma sebesar 8,95 juta rupiah.

Pembangunan manusia harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Pemerintah perlu terus mengupayakan berbagai program dan kebijakan yang lebih menasar pada ketersediaan fasilitas, infrastruktur dan juga membangun kesadaran masyarakatnya. Di bidang kesehatan, ketersediaan dan pemerataan

fasilitas kesehatan seperti tenaga medis, sarana prasarana dan alat kesehatan serta jaminan kesehatan menjadi salah satu input penting dalam pembangunan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sehat. Selain itu, dukungan infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan dan transportasi juga dibutuhkan sehingga masyarakat semakin mudah dalam mengakses fasilitas kesehatan. Di bidang pendidikan, ketersediaan dan pemerataan fasilitas pendidikan seperti guru dan sarana prasarana sekolah menjadi salah satu kunci penting berhasilnya proses belajar mengajar sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas pendidikan. Sama halnya dengan akses terhadap fasilitas kesehatan, infrastruktur yang memadai untuk menunjang kemudahan akses terhadap fasilitas pendidikan juga mutlak diperhatikan. Pendidikan sebagai investasi jangka panjang akan meningkatkan daya saing penduduk sehingga mampu berkompetisi dalam perekonomian yang semakin terbuka saat ini. Harapannya, hal tersebut akan berdampak pada penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.

Peningkatan kapabilitas dasar manusia ini merupakan upaya dalam meningkatkan potensi bangsa yang pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan kualitas manusia. Pendidikan dan kesehatan menjadi modal utama yang harus dimiliki suatu bangsa untuk meningkatkan potensinya. Oleh karena itu, untuk menciptakan manusia yang berkualitas dapat dimulai dengan perbaikan pada kedua aspek tersebut. Apabila hal ini dilakukan dengan komitmen yang serius, harapan agar manusia Indonesia memiliki umur panjang dan sehat, berpengetahuan, dan hidup layak dapat terwujud.

DAFTAR ISI

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

PROVINSI BENGKULU 2023

Kata Pengantar	v
Abstraksi	vii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xix

BAB 1 Penjelasan Umum

1.1 Sejarah Indeks Pembangunan Manusia	3
1.2 Konsep Dasar Pembangunan Manusia	5
1.3 Metode Penghitungan	7
1.4 Tujuan Pembangunan Manusia.....	12

BAB 2 Perkembangan Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu

2.1 Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu Semakin Meningkat	17
2.2 Dimensi Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota	23

BAB 3 Peningkatan Kapabilitas Dasar Manusia Provinsi Bengkulu

3.1 Hidup Lebih Lama dan Kesehatan yang Lebih Baik	33
3.2 Pendidikan Memperluas Peluang	40
3.3 Peningkatan Standar Hidup Layak	45

BAB 4 Disparitas Pembangunan Manusia

4.1 Disparitas Pembangunan Manusia di Provinsi Bengkulu .. 52

4.2 Komponen Pembangunan Manusia Tertinggi dan Terendah..... 57

BAB 5 Perbandingan Antar Wilayah

5.1 Perbandingan Pembangunan Manusia Antar Provinsi di Sumatera 63

5.2 Status dan Pertumbuhan Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota 64

Daftar Pustaka 69

Lampiran 71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Dimensi IPM	11
Tabel 1.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bengkulu dan Komponen, 2023	18
Tabel 2.2	Klasifikasi Status Pembangunan Manusia	20
Tabel 4.1	Peringkat Kabupaten/Kota dengan Komponen Pembangunan Manusia Tahun 2023	59

<https://bengkulu.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perjalanan Perubahan Metode Penghitungan IPM Dari Waktu ke Waktu	5
Gambar 1.2	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	14
Gambar 2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Laju Pertumbuhan IPM Provinsi Bengkulu, 2020-2023,	19
Gambar 2.2	Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) dan Laju Pertumbuhan UHH Provinsi Bengkulu, 2020-2023	21
Gambar 2.3	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Laju Pertumbuhan HLS Provinsi Bengkulu, 2020-2023	22
Gambar 2.4	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Laju Pertumbuhan RLS Provinsi Bengkulu, 2020-2023	22
Gambar 2.5	Perkembangan Pengeluaran per Kapita (000 Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita (Persen) Provinsi Bengkulu, 2020-2023	23
Gambar 2.6	IPM Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, 2023	24
Gambar 2.7	Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, 2023	26
Gambar 2.8	Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, 2023	27
Gambar 2.9	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, 2023	28
Gambar 2.10	Pengeluaran per Kapita Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bengkulu, 2023 (000 Rp)	29

Gambar 3.1	Usia Harapan Hidup (UHH) dan Laju Pertumbuhan UHH Provinsi Bengkulu, 2020-2023	34
Gambar 3.2	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan di Provinsi Bengkulu, 2020-2023	35
Gambar 3.3	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat Jalan di Provinsi Bengkulu, 2023	37
Gambar 3.4	Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik Pratama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2023	38
Gambar 3.5	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2023	39
Gambar 3.6	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan di Provinsi Bengkulu, 2023	39
Gambar 3.7	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), 2020-2023	41
Gambar 3.8	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bengkulu, 2020-2023	43
Gambar 3.9	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bengkulu, 2020-2023	44
Gambar 3.10	Pengeluaran per Kapita dan Laju Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Provinsi Bengkulu, 2020-2023	46
Gambar 3.11	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bengkulu (Kondisi Maret), 2020-2023	47
Gambar 3.12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bengkulu (Kondisi Agustus), 2020-2023	48
Gambar 4.1	Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Provinsi Bengkulu, 2020-2023	52
Gambar 4.2	Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Provinsi Bengkulu, 2020-2023	53

Gambar 4.3	Selisih HLS Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Provinsi Bengkulu, 2020-2023	55
Gambar 4.4	Selisih RLS Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Provinsi Bengkulu, 2020-2023	55
Gambar 4.5	Selisih Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Provinsi Bengkulu, 2020-2023	57
Gambar 5.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Laju Pertumbuhan Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, 2023	64
Gambar 5.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Status Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2023	66
Gambar 5.3	Pertumbuhan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2023 (persen)	67
Gambar 5.4	Pertumbuhan Komponen Penyusun IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2023 (persen)	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2023	73
Lampiran 2	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2020-2023	75
Lampiran 3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2023	77
Lampiran 4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2022	78
Lampiran 5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2021	79
Lampiran 6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2020	80

BAB 1

Penjelasan Umum



Komponen Penyusun IPM



Dimensi Kesehatan

- Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir



Dimensi Pendidikan

- Harapan Lama Sekolah (RLS)
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS)



Dimensi Standar Hidup Layak

- Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan



Bab 1

Penjelasan Umum

1.1 Sejarah Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia dirumuskan pada tahun 1990 oleh UNDP (*United Nation Development Programme*). Menurut UNDP, pembangunan manusia merupakan perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choice of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya kearah perluasan pilihan dan sekaligus taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Sebelum tahun 1990, dunia seolah melupakan arti pentingnya manusia dalam pembangunan ekonomi. Fokus dunia dalam perekonomian hanya meliputi pendapatan, modal dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pembahasan tentang pembangunan manusia hanya sebatas modal manusia. Artinya, manusia hanya dipandang sebagai input dan juga alat dalam pembangunan.

Setelah diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, IPM dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). UNDP menegaskan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Laporan HDR menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia sejatinya menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, sekaligus menjadi input pembangunan.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan,

dan sebagainya. Dimensi dasar yang digunakan dalam mengukur IPM adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM. Penyempurnaan terkait indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu tahun 1991 dan 1995, kemudian dilakukan perubahan metode penghitungan pada tahun 2010.

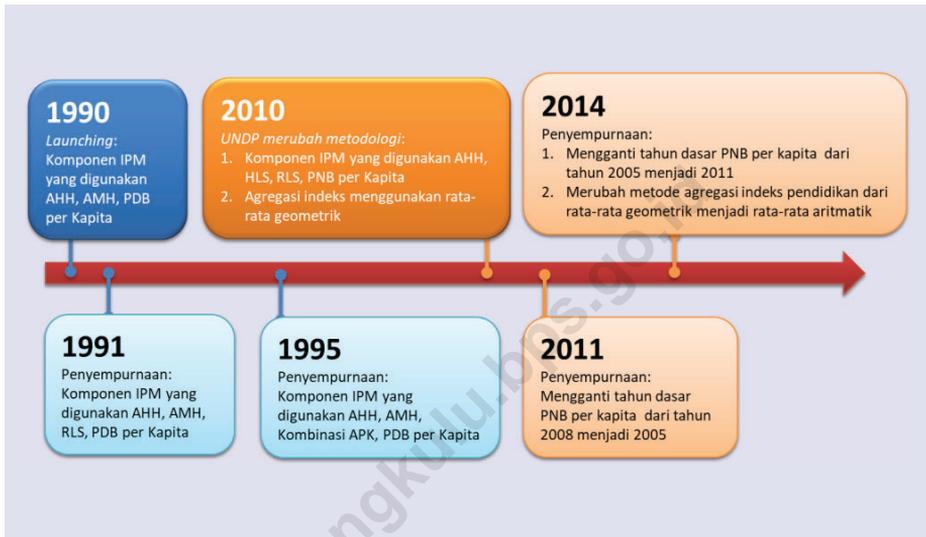
Tahun 1991 UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan indikator rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan, sehingga terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. UNDP memberi bobot yang berbeda untuk kedua indikator tersebut, indikator angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, sementara indikator rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga. Keempat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM masih cukup relevan hingga 1994. Namun pada tahun 1995 UNDP kembali melakukan penyempurnaan metode penghitungan IPM, yaitu mengganti variabel rata-rata lama sekolah menjadi gabungan angka partisipasi kasar. Sedangkan pembobotan tetap dilakukan dengan metode yang sama seperti sebelumnya.

Tahun 2010, UNDP melakukan penyempurnaan kembali dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak namun menggunakan indikator yang berbeda, yaitu umur harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Metode agregasi IPM pun mengalami penyempurnaan, dari rata-rata aritmatik diubah menjadi rata-rata geometrik. Sedangkan metode agregasi untuk indeks pendidikan berubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik.

Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain:

- Umur harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2020 *Long Form*)

- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS)
- PNB per kapita diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan SUSENAS.



Gambar 1.1 Perjalanan Perubahan Metode Penghitungan IPM Dari Waktu ke Waktu

1.2 Konsep Dasar Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia sejatinya memiliki makna yang luas. Namun, ide dasar pembangunan manusia itu sendiri yaitu pertumbuhan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Fokus dalam pembangunan manusia kepada manusia dan kesejahteraan. Beberapa ahli mengemukakan tentang konsep pembangunan manusia, misalnya Amartya Sen (1989), mendefinisikan pembangunan manusia sebagai perluasan kebebasan nyata yang dinikmati oleh manusia. Kebebasan bergantung pada faktor sosial ekonomi seperti akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan politik. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mahbub ul Haq (1995). Beliau berpendapat bahwa pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan yaitu kebebasan berpolitik, partisipasi dalam

kehidupan bermasyarakat, pilihan untuk berpendidikan, bertahan hidup dan sehat, serta menikmati standar hidup layak.

Dengan menggunakan konsep dasar yang dikemukakan oleh Sen dan Haq, UNDP menggarisbawahi tentang ide dasar pembangunan manusia, yaitu:

- **Manusia**
Pembangunan manusia harus berfokus pada peningkatan kualitas kehidupan yang dijalani oleh masyarakat dibandingkan dengan hanya mengandalkan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan secara otomatis meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam sudut pandang ini, pertumbuhan ekonomi dilihat sebagai alat untuk pembangunan, bukan tujuan akhir pembangunan.
- **Kesempatan**
Pembangunan manusia pada prinsipnya memberikan lebih banyak kebebasan kepada manusia untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Hal ini berarti bahwa pembangunan manusia harus mampu mengembangkan kemampuan manusia dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggunakan kemampuannya. Misalnya, mendidik seorang perempuan secara tidak langsung akan membangun keterampilannya. Akan tetapi, hal tersebut tidak akan banyak berguna jika dia tidak diberi akses ke pekerjaan atau memiliki keterampilan yang tepat dalam pasar tenaga kerja lokal. Tiga landasan penting dalam pembangunan manusia adalah berumur panjang, sehat dan kreatif; berpengetahuan luas; dan memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk standar hidup yang layak. Banyak hal lain yang juga penting, terutama dalam membantu menciptakan kondisi yang tepat untuk pembangunan manusia. Jika dasar-dasar pembangunan manusia dapat tercapai, masyarakat dapat membuka peluang untuk kemajuan dalam aspek kehidupan lainnya.

1.3 Metode Penghitungan

Pada tahun 2010, UNDP melakukan perubahan drastis metodologi penghitungan IPM, hingga menyebutnya sebagai metode baru. Variabel dalam penghitungan IPM Metode Baru adalah :

1. Angka Harapan Hidup saat Lahir - AHH (*Life Expectancy – e0*)

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil Sensus Penduduk 2020 *Long Form*.

2. Rata-rata Lama Sekolah – RLS (*Mean Years of Schooling – MYS*)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

3. Harapan Lama Sekolah – HLS (*Expected Years of Schooling – EYS*)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem Pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren adalah dari Direktorat Pendidikan Islam.

4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Perhitungan paritas daya beli metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.

Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam menghitung PPP. Pada metode baru, terpilih 96 komoditas dalam penghitungan PPP.

Formula Penghitungan Harapan Lama Sekolah

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan :

HLS_a^t	Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t
E_i^t	Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t
P_i^t	Jumlah penduduk usia i pada tahun t
i	Usia (a, a+1, ..., n)
FK	Faktor koreksi pesantren

Faktor Koreksi Pesantren

$$\text{Rasio santri mukim} = \frac{\text{Jumlah bermukim}}{\text{Jumlah santri seluruhnya}}$$

Jumlah santri sekolah dan mukim = rasio santri mukim x jumlah santri sekolah

$$\text{Faktor Koreksi} = \frac{\text{Jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}} + 1$$

Rumus Penghitungan Paritas Daya Beli (PPP)

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

p_{ij} : harga komoditas i di kab/kota j

p_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan

m : jumlah komoditas

Beberapa tahapan dalam penghitungan IPM dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Tahap pertama** adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM (Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Pengeluaran)

Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

Dimana:

UHH = Umur Harapan Hidup saat Lahir

UHH_{max} = Nilai Maksimum UHH

UHH_{min} = Nilai Minimum UHH

Dimensi Standar Hidup Layak (pengeluaran)

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln_{pengeluaran} - \ln_{(pengeluaran_{min})}}{\ln_{(pengeluaran_{maks})} - \ln_{(pengeluaran_{min})}}$$

Keterangan:

Indeks pendapatan diproksi dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan \ln adalah logaritma natural

Dimensi Pendidikan

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2}$$

Keterangan: HLS dan RLS dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

Dimana:

I_{HLS} = Indeks Harapan Lama Sekolah

HLS = Harapan Lama Sekolah

HLS_{maks} = Nilai Maksimum Harapan Lama Sekolah

HLS_{min} = Nilai Minimum Harapan Lama Sekolah

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Dimana:

I_{RLS} = Indeks rata-rata lama sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

RLS_{maks} = Nilai Maksimum Rata-rata Lama Sekolah

RLS_{min} = Nilai Minimum Rata-rata Lama Sekolah

2. **Tahap kedua**, dengan menghitung rata-rata geometrik dari Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Pengeluaran dengan rumus:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{AHH} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Penentuan nilai maksimum dan minimum dari seluruh dimensi pembentuk IPM menggunakan standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah seperti yang terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Dimensi IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Hidup	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP U\$)	1.007.436* (IDR)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352* (IDR)

Catatan : *Daya beli minimum berasal dari garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikora-Papua

**Daya beli maksimum berasal dari nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Sumber : *Measuring The real Size of the World Economy, The World Bank* dan BPS

3. Tahap ketiga adalah menghitung kecepatan IPM, digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu tertentu. Kecepatan IPM dihitung diukur dengan ukuran pertumbuhan IPM per tahun.

$$Pertumbuhan\ IPM = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

IPM_t = IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} = IPM suatu wilayah pada tahun t-1

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dikelompokkan kedalam empat kelompok, yaitu:

1. Kelompok “sangat tinggi” : $IPM \geq 80$
2. Kelompok “tinggi” : $70 \geq IPM < 80$
3. Kelompok “sedang” : $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok “rendah” : $IPM < 60$

1.4 Tujuan Pembangunan Manusia

Pada tahun 2015, isu tentang pembangunan kembali menghangat. Di tahun ini, *Millenium Development Goals* (MDGs) memasuki batas tahun pencapaian. MDGs merupakan referensi penting pembangunan di Indonesia. Agenda MDGs akan dilanjutkan dengan mengembangkan konsep dalam konteks kerangka/agenda pembangunan pasca 2015 yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Konsep SDGs diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015. Hal ini terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya (*depletion*) sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim yang semakin krusial, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin (Bappenas).

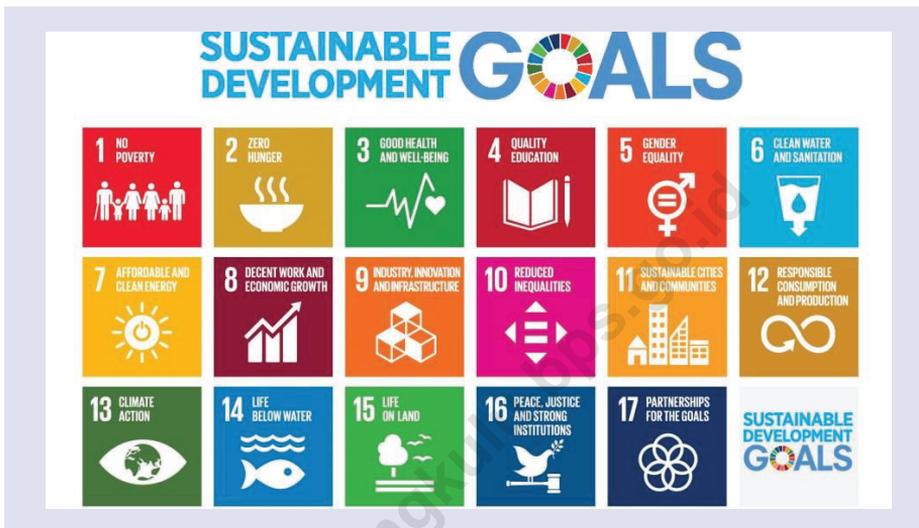
Terdapat tiga pilar utama yang menjadi indikator dalam pembentukan konsep pengembangan SDGs, yaitu:

1. Indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), yaitu pendidikan dan kesehatan.
2. Indikator yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Sosial Economic Development*), yaitu ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan serta pertumbuhan ekonomi.
3. Indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*) berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Berdasarkan ketiga pilar tersebut, dirincikan kembali kedalam 17 tujuan yang harus dicapai. Dalam 17 tujuan tersebut, terdapat beberapa target yang berhubungan dengan pembangunan manusia, yaitu tujuan ketiga, tujuan keempat, dan tujuan kedelapan. Ketiga tujuan tersebut adalah:

1. Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Salah satu targetnya (3b) yaitu mengakhiri kematian anak, kematian ibu, dan kematian akibat penyakit pada penduduk usia kurang dari 70 tahun. Jika dikaitkan dengan salah satu indikator pembentuk IPM, umur harapan hidup saat lahir secara tidak langsung akan menjadi salah satu indikator dari SDGs. Secara tidak langsung pula, umur harapan hidup saat lahir akan meningkat jika salah satu indikator SDGs yaitu angka kematian neonatal ditekan guna mencapai target tertentu.
2. Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Pada salah satu targetnya (4b), dinyatakan bahwa memastikan semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses ke pengembangan anak usia dini yang setara, perawatan, dan pendidikan anak usia dini sehingga mereka siap untuk Pendidikan dasar. Pada target ini, diharapkan angka kelulusan baik SD, SMP, maupun SMA ditingkatkan. Secara langsung, Ketika target ini dicapai maka angka rata-rata lama sekolah yang merupakan salah satu indikator penghitungan IPM akan ikut meningkat.
3. Tujuan kedelapan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dalam target 8a yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) minimal 7 persen per tahun di negara-negara berkembang. Salah satu indikator dari target ini adalah meningkatkan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Dengan meningkatnya PNB per kapita, secara tidak langsung akan menaikkan pengeluaran perkapita.

Melalui SDGs, tujuan dan target pembangunan manusia terus diupayakan peningkatannya. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa pembangunan manusia dapat tercapai melalui pencapaian target SDGs.



Gambar 1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

BAB 2

Perkembangan Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu



IPM Provinsi Bengkulu Tahun 2023

74,30



Umur Harapan Hidup (UHH)
Saat Lahir

73,11 Tahun



Harapan Lama Sekolah

13,74 Tahun

Rata-rata Lama Sekolah
9,83 Tahun



Pengeluaran per Kapita
D disesuaikan

**11,17 Juta Rupiah
/Tahun**

Perkembangan IPM Provinsi Bengkulu

72,93

2020

73,16

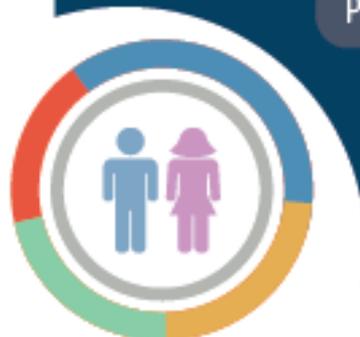
2021

73,68

2022

74,30

2023



Bab 2

Perkembangan Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu

2.1 Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu Semakin Meningkat

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi saja, tetapi juga dari aspek pembangunan manusianya. Pembangunan manusia sejatinya memiliki makna yang luas. Selain itu, pembangunan manusia merupakan isu yang strategis, sehingga perlu diamati perkembangannya dengan angka yang terukur. Angka ini dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara garis besar, indikator yang digunakan dalam mengukur IPM adalah kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebagai indikator komposit, jika IPM disajikan tersendiri maka hanya menunjukkan status pembangunan manusia suatu wilayah. Manfaat IPM dapat diperluas jika dilakukan perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Kemajuan pencapaian IPM antar waktu di suatu wilayah dengan pencapaian wilayah lain juga dapat dilakukan kajiannya.

Berdasarkan hasil penghitungan IPM menggunakan nilai Usia Harapan Hidup (UHH) hasil *Long Form* SP2020, IPM Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 sebesar 74,30. Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator, dimensi

Tabel 2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bengkulu dan Komponen, 2023

Komponen	Nilai
(1)	(2)
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	73,11
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,74
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,03
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun)	11.172
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	74,30

Catatan : IPM Menggunakan UHH hasil *Long Form* SP2020

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023

umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Umur harapan hidup saat lahir di Provinsi Bengkulu mencapai 73,11. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata bayi yang lahir tahun 2023 diharapkan dapat bertahan hidup hingga usia 73,11 tahun. Dari dimensi pengetahuan yaitu harapan lama sekolah sebesar 13,74 tahun yang artinya anak berusia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 13,74 tahun atau mencapai Diploma I. Sedangkan rata-rata lama sekolah yaitu 9,03 tahun, angka ini menunjukkan secara rata-rata penduduk 25 tahun ke atas di Provinsi Bengkulu telah menempuh Pendidikan hingga 9,03 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP. Dari dimensi ekonomi, rata-rata pengeluaran

mencapai 11,17 juta rupiah per kapita per tahun. Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.



Catatan : IPM Menggunakan UHH hasil *Long Form* SP2020

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023

Gambar 2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Laju Pertumbuhan IPM Provinsi Bengkulu, 2020-2023

Pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun. IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Pada tahun 2023, IPM Provinsi Bengkulu mencapai 74,30. Angka ini meningkat sebesar 0,62 poin atau tumbuh sebesar 0,84 persen dibandingkan dengan tahun 2022.

Sementara itu, laju pertumbuhan IPM mulai mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan tahun 2022 sebesar 0,71 persen mengalami peningkatan dari sebelumnya sebesar 0,32 persen di tahun 2021. Laju pertumbuhan ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selain dari pertumbuhan IPM, status pembangunan manusia juga menjadi salah satu indikator untuk melihat kemajuan pembangunan

manusia. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengkategorikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 mencapai 74,30. Dengan capaian IPM tersebut, Provinsi Bengkulu berada pada status pembangunan manusia kategori “tinggi”.

Tabel 2.2 Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Nilai	Kategori
(1)	(2)
< 60	Rendah
$60 \leq \text{IPM} < 70$	Sedang
$70 \leq \text{IPM} < 80$	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Semua dimensi pembentuk IPM tahun 2023 mengalami peningkatan. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh umur harapan hidup (UHH) saat lahir. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Pada tahun 2023, umur harapan hidup saat lahir sebesar 73,11 tahun, tumbuh sebesar 0,29 persen dari tahun 2022, sedikit melambat jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2022 yang sebesar 0,34 persen.

Perkembangan umur harapan hidup saat lahir dari tahun 2020 sampai 2023 terus meningkat. Secara rata-rata, umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun selama tahun 2020-2023. Hal ini

menunjukkan bahwa harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap pola hidup sehat.



Catatan : UHH hasil *Long Form* SP2020

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023

Gambar 2.2 Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) dan Laju Pertumbuhan UHH Provinsi Bengkulu, 2020-2023

Dimensi pengetahuan dalam penghitungan IPM merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan masyarakat mulai dari usia 7 tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Pada tahun 2023, pertumbuhan harapan lama sekolah di Provinsi Bengkulu sebesar 0,44 persen, mengalami percepatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 0,07 persen.

Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah Provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Secara rata-rata, angka harapan lama sekolah tumbuh sebesar 0,32 persen per tahun selama tahun 2020-2023. Sedangkan rata-rata lama

sekolah tumbuh sebesar 0,71 persen per tahun dalam kurun waktu 2020 hingga 2023. Kedua indikator ini menggambarkan capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023

Gambar 2.3 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Laju Pertumbuhan HLS Provinsi Bengkulu, 2020-2023



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023

Gambar 2.4 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Laju Pertumbuhan RLS Provinsi Bengkulu, 2020-2023

Standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan, mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Agar kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah menjadi terbanding, perlu dibuat standarisasi. Dengan adanya standarisasi ini, maka perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan. Pada tahun 2023, pertumbuhan pengeluaran per kapita di Provinsi Bengkulu sebesar 3,06 persen, sedikit melambat jika dibandingkan pertumbuhan di tahun 2022 yang sebesar 3,37 persen.



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023

Gambar 2.5 Perkembangan Pengeluaran per Kapita (000 Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita (Persen) Provinsi Bengkulu, 2020-2023

2.2 Dimensi Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Wilayah Provinsi Bengkulu terdiri dari 10 kabupaten/kota. IPM kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 cukup bervariasi antara 70,27 hingga 83,38. Kabupaten Seluma merupakan kabupaten dengan IPM terendah yaitu 70,27, sedangkan Kota Bengkulu merupakan wilayah dengan IPM tertinggi sebesar 83,38, diatas Provinsi Bengkulu yang hanya sebesar 74,30. Selain Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong juga nilai IPMnya berada di atas Provinsi Bengkulu. Sedangkan 8 kabupaten lainnya berada di bawah IPM Provinsi Bengkulu.



Catatan : IPM Menggunakan UHH hasil *Long Form* SP2020
 Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023

**Gambar 2.6 IPM Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota se-
Provinsi Bengkulu, 2023**

Menurut Ernest W Burgess dalam *Introduction to Science of Sociology* (1921), manusia punya kecenderungan alamiah untuk berada sedekat mungkin dengan pusat kota. Untuk mewujudkan itu, dikembangkan kota berbentuk konsentrik dengan pusat kota sebagai intinya. Teori Konsentris (Burgess, 1925) menyatakan bahwa daerah pusat kota (DPK) atau *Central Business District* (CBD) adalah pusat kota yang letaknya tepat di tengah kota dan berbentuk bundar yang merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta merupakan zona dengan derajat aksesibilitas tinggi dalam suatu kota. Hal ini sejalan dengan pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu, dimana Kota Bengkulu merupakan wilayah dengan IPM tertinggi se Provinsi Bengkulu.

Dari sisi klasifikasinya, terdapat sembilan wilayah kategori IPM tinggi dengan nilai IPM 70 hingga kurang dari 80, yaitu kabupaten Bengkulu Tengah, Kepahiang, Lebong, Mukomuko, Seluma, Kaur, dan Bengkulu Utara, Rejang Lebong dan Bengkulu Selatan. Dan hanya Kota Bengkulu termasuk dalam IPM kategori sangat tinggi karena nilai IPM diatas 80 yaitu 83,38. Klasifikasi ini juga menjadikan Provinsi Bengkulu sebagai Provinsi dengan kategori IPM tinggi.

Wilayah di Provinsi Bengkulu memiliki nilai IPM yang cukup variatif. Terjadi kesenjangan nilai IPM antara Ibu Kota yaitu Kota Bengkulu dengan kategori IPM sangat tinggi. Sedangkan kabupaten lainnya masuk dalam kategori IPM tinggi. Hal tersebut menunjukkan masih ada gap yang cukup lebar dalam pencapaian pembangunan manusia. Situasi ini bisa disebabkan karena Kota Bengkulu sebagai ibu kota dan berstatus kota, sementara lainnya merupakan kabupaten.

Beberapa perbedaan mendasar antara kota dan kabupaten adalah terletak pada perbedaan kelengkapan fasilitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Fasilitas yang lengkap di daerah berstatus kota memberikan kemudahan dan peluang lebih besar dalam mendapat akses pendidikan, kesehatan dan perekonomian sehingga berdampak dalam peningkatan capaian pembangunan manusia yang tinggal didalamnya. Berbeda dari kabupaten, yang tidak selengkap dan semudah dibanding kota dalam mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan kegiatan dalam meningkatkan perekonomian diwilayahnya. Bahkan keadaan topografi daerah yang berbeda dengan kota. Daerah berstatus kota cenderung memiliki beberapa keuntungan seperti luas wilayah yang lebih kecil dan terjangkau dari segi akses transportasi dibandingkan daerah berstatus kabupaten.



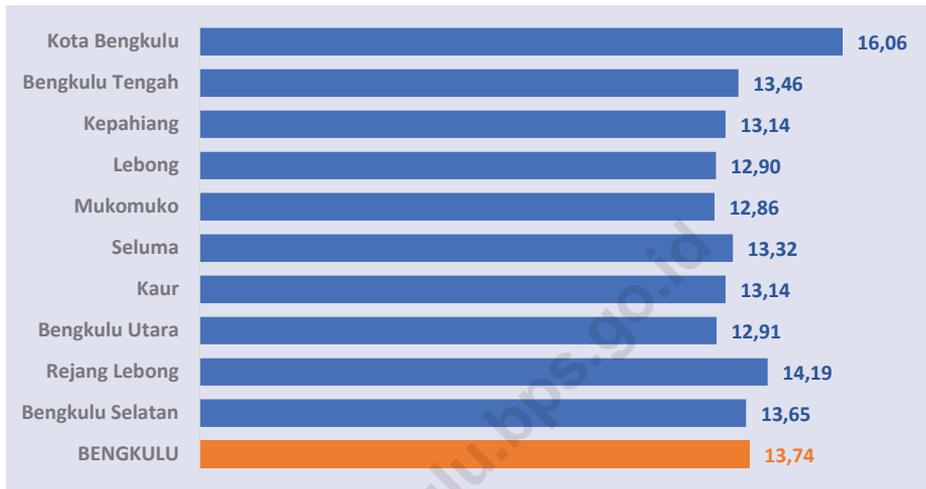
Catatan : IPM Menggunakan UHH hasil *Long Form* SP2020
 Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023

Gambar 2.7 Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, 2023

Umur harapan hidup (UHH) kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 cukup bervariasi. Umur harapan hidup tertinggi pada Kota Bengkulu yang mencapai 74,43 tahun. Sedangkan umur harapan hidup terendah sebesar 72,26 tahun di Kabupaten Kepahiang. Sedangkan kabupaten lainnya berkisar antara 72,46 hingga 73,71 tahun. Sementara itu, UHH Provinsi Bengkulu 73,11 tahun berada dibawah UHH Kota Bengkulu, Mukomuko dan Rejang Lebong dan berada diatas UHH 7 Kabupaten lainnya.

Kondisi diatas menunjukkan bahwa wilayah kota masih mendominasi dalam pencapaian UHH yang tinggi. Secara rinci, UHH sembilan kabupaten lainnya bila diurutkan dari UHH terendah adalah Kepahiang (72,26 tahun), Bengkulu Tengah (72,46 tahun), Lebong (72,59 tahun), Seluma (72,71 tahun), Kaur (72,74 tahun), Bengkulu Selatan (72,87 tahun), Bengkulu Utara (73,03 tahun), Rejang Lebong (73,67 tahun), dan Mukomuko (73,71 tahun). Hal ini menunjukkan wilayah kota dan wilayah dengan akses yang mudah dijangkau memiliki capaian pembangunan kesehatan yang lebih baik dan mampu

memberikan layanan kesehatan secara lebih optimal. Sementara itu, tantangan pelayanan kesehatan terkendala oleh akses pelayanan yang masih terbatas.



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023

Gambar 2.8 Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, 2023

Dari capaian harapan lama sekolah (HLS), terlihat Kota Bengkulu juga menempati posisi tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya. HLS Kota Bengkulu mencapai 16,06 tahun. Sementara HLS kabupaten lainnya masih berkisar antara 12 hingga 14 tahun. Hal ini menunjukkan selisih HLS yang cukup tinggi antara kota Bengkulu dan kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu.

HLS Kota Bengkulu sudah mencapai level yang setara dengan sarjana. Artinya partisipasi sekolah di Kota Bengkulu sudah baik, bahkan jauh melampaui target dari program wajib belajar 12 tahun. Penduduk Kota Bengkulu yang berusia sekolah mulai 7 hingga 24 tahun, secara umum masih mengenyam pendidikan. Salah satu hal yang mendorong Kota Bengkulu memiliki HLS relatif tinggi adalah tersedianya fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, bahkan memiliki 14 perguruan tinggi yang terdiri dari 1 perguruan tinggi negeri dan 13 perguruan tinggi swasta. Sementara itu, bila dilihat dari kabupaten lainnya, Rejang Lebong memiliki 5 perguruan tinggi, Mukomuko dan Bengkulu Selatan

memiliki 3 perguruan tinggi, dan Bengkulu Utara hanya memiliki 1 perguruan tinggi swasta. Adapun 5 kabupaten lainnya tidak memiliki perguruan tinggi (sumber: BPS, Potensi Desa).

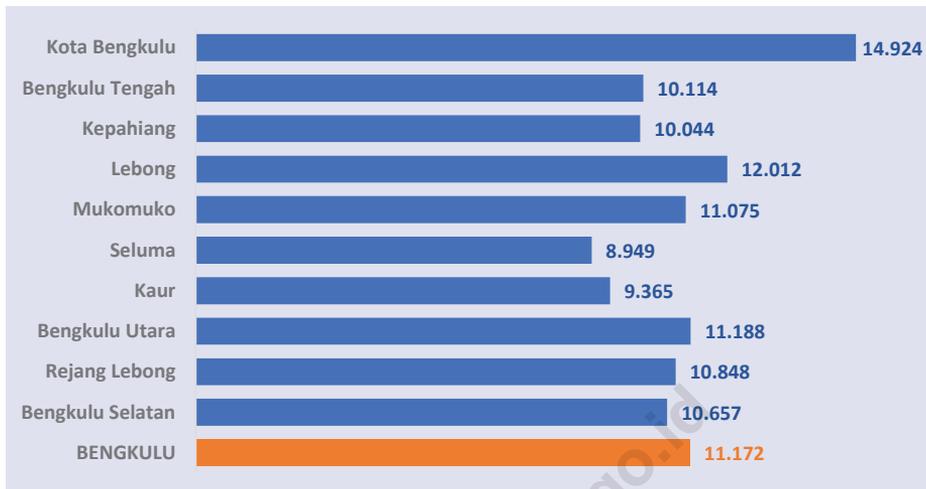


Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023

Gambar 2.9 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, 2023

Indikator berikutnya adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah menggambarkan output dari program pembangunan pendidikan pada masa lalu. Sebab lama sekolah yang dimiliki seseorang dihitung saat mereka sudah berusia 25 tahun. Asumsinya pada umur 25 tahun, seseorang sudah selesai mengenyam bangku sekolah.

Pada tahun 2023, sama halnya dengan HLS, RLS tertinggi juga diraih kota Bengkulu. RLS penduduk kota Bengkulu yang berusia 25 tahun keatas adalah 11,83 tahun, setara dengan kelas 2 SMA atau sederajat. Secara rinci, RLS Sembilan kabupaten lainnya bila diurutkan dari RLS terendah adalah Bengkulu Tengah (7,51 tahun), Bengkulu Utara (8,11 tahun), Seluma (8,13 tahun), Lebong (8,26 tahun), Kepahiang (8,36 tahun), Kaur (8,41 tahun), Mukomuko (8,56 tahun), Rejang Lebong (8,80 tahun) dan Bengkulu Selatan (9,41 tahun). Sementara itu, RLS Provinsi Bengkulu sebesar 9,03 tahun berada dibawah RLS Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan, namun masih berada diatas RLS delapan kabupaten lainnya.



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023

Gambar 2.10 Pengeluaran per Kapita Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, 2023 (000 Rp)

Indikator pengeluaran per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu cukup bervariasi. Bahkan memiliki rentang yang cukup jauh, dari 8,95 juta rupiah per kapita hingga 14,92 juta rupiah per kapita selama tahun 2023. Pengeluaran per kapita tertinggi ada di Kota Bengkulu, sementara terendah ada di Kabupaten Seluma. Semakin besar pengeluaran per kapita menunjukkan semakin tinggi tingkat kemampuan penduduk dalam melakukan aktivitas konsumsi. Salah satu pendorong aktivitas konsumsi yang tinggi adalah pendapatan yang juga tinggi. Pendapatan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur tingginya pembangunan di suatu wilayah. Oleh karena itu, pengeluaran per kapita disesuaikan disini dapat menjadi proksi untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduknya. Dengan demikian, Kota Bengkulu relatif lebih maju pada aspek ekonomi dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bengkulu.

BAB 3

Peningkatan Kapabilitas Dasar Manusia Provinsi Bengkulu



Keluhan Kesehatan

11,75

Angka Kesakitan

27,81

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan



Angka Partisipasi Murni (APM)



SD

98,61



SMP

81,08



SMA

67,09



Penduduk Miskin

288,46

Jumlah penduduk miskin (000 Jiwal)

14,04

Persentase penduduk miskin



Bab 3

Peningkatan Kapabilitas Dasar Manusia Provinsi Bengkulu

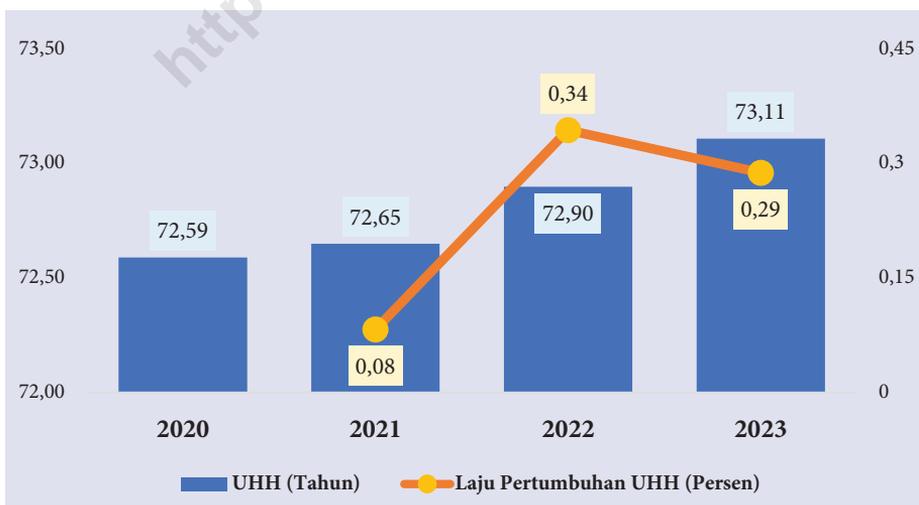
Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset kekayaan bangsa sekaligus sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing, pendidikan dan kesehatan merupakan modal utama yang harus dimiliki manusia agar mampu meningkatkan potensinya dan berkontribusi dalam pembangunan. Semakin baik pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan bagi penduduk, semakin besar pula potensi bagi penduduk tersebut untuk ikut menggerakkan dan mempercepat pembangunan di suatu wilayah. Selain itu, posisi penduduk dalam pembangunan nasional adalah sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Oleh karena itu, hasil dari pembangunan tersebut sudah semestinya dirasakan oleh penduduk dimana penduduk dapat menikmati hidup yang sejahtera.

3.1 Hidup Lebih Lama dan Kesehatan yang Lebih Baik

Salah satu komponen dasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia adalah pembangunan di bidang kesehatan. Kesehatan berperan penting agar manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan menjadi produktif. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan ditandai dengan terwujudnya penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan

yang bermutu dan merata, serta meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hidup sehat, serta mendukung dan menjaga berbagai fasilitas kesehatan.

Salah satu tujuan peningkatan kesehatan masyarakat adalah untuk mewujudkan umur panjang yang merupakan dambaan setiap orang karena memberi kesempatan lebih panjang untuk menikmati kehidupan. Dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia, dimensi umur panjang dan hidup sehat diproksi dengan indikator Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. UHH saat lahir diartikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur X, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Secara umum, peningkatan usia harapan hidup penduduk pada saat lahir di suatu wilayah menggambarkan kualitas kesehatan penduduk yang semakin membaik. Semakin tinggi nilai UHH menunjukkan adanya peningkatan kualitas kesehatan sehingga manusia berpeluang memiliki usia hidup yang lebih lama.



Catatan : UHH menggunakan hasil *Long Form* SP2020

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

Gambar 3.1 Usia Harapan Hidup (UHH) dan Laju Pertumbuhan UHH Provinsi Bengkulu, 2020-2023

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa UHH Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 mencapai 73,11 tahun. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2023 diperkirakan akan dapat bertahan hidup hingga berusia 73,11 tahun. UHH ini terlihat terus meningkat sejak tahun 2020 yang berarti harapan hidup seorang bayi yang baru lahir setiap tahunnya semakin lama semakin tinggi. Pada tahun 2020, UHH Provinsi Bengkulu sebesar 72,59 tahun dan pada tahun 2023 naik menjadi menjadi 73,11 tahun. Artinya, dari 2020 hingga 2023, UHH Provinsi Bengkulu telah meningkat sebesar 0,52 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun. Laju pertumbuhan UHH terbesar terjadi pada tahun 2022, mencapai 0,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan UHH ini mengindikasikan adanya perbaikan pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Bengkulu.



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu 2020-2023

Gambar 3.2 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan di Provinsi Bengkulu, 2020-2023

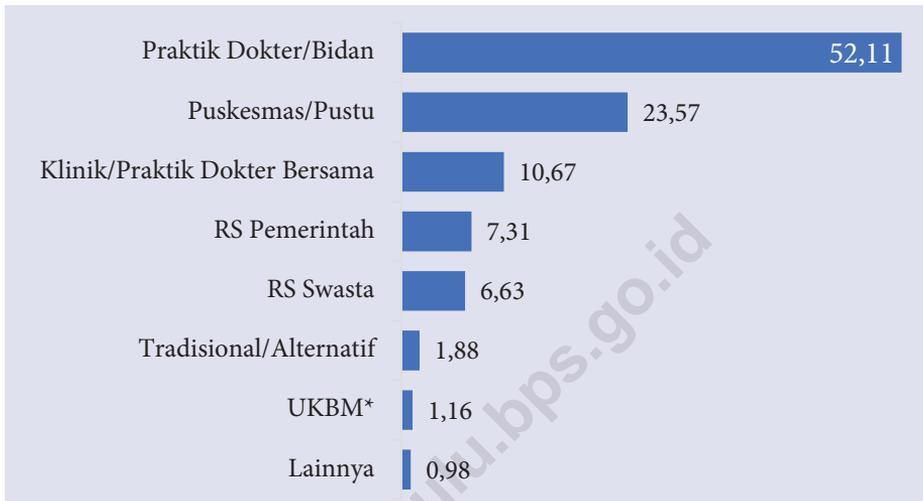
Selain UHH, keberhasilan program pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat juga dapat dinilai dari banyaknya keluhan kesehatan masyarakat dan tingkat morbiditas. Keluhan kesehatan merupakan keadaan seseorang yang mengalami

gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya. Berdasarkan hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023, persentase penduduk Provinsi Bengkulu yang mempunyai keluhan kesehatan mencapai 27,81 persen (Gambar 3.2). Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 3 dari 10 orang di Provinsi Bengkulu memiliki keluhan kesehatan. Jika ditinjau menurut jenis kelamin, penduduk perempuan di Provinsi Bengkulu lebih banyak yang memiliki keluhan kesehatan dibandingkan penduduk laki-laki, yakni masing-masing sebanyak 29,35 persen dan 26,31 persen. Namun, bila dibandingkan dengan 2022, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan menunjukkan adanya sedikit peningkatan.

Sementara itu, morbiditas adalah kondisi dimana penduduk mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari (tidak dapat melakukan kegiatan secara normal seperti bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya). Tingkat morbiditas penduduk dapat dilihat dari indikator Angka Kesakitan. Semakin tinggi Angka Kesakitan menunjukkan rendahnya tingkat kesehatan penduduk sehingga rentan terhadap berbagai macam penyakit yang muncul. Hasil Susenas Maret 2023 menunjukkan bahwa Angka Kesakitan di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 11,75 yang berarti persentase penduduk di Provinsi Bengkulu yang menderita sakit mencapai 11,75 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, Angka Kesakitan untuk penduduk perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, yakni masing-masing sebesar 12,61 persen dan 10,91 persen.

Dalam mengobati keluhan penyakit, masyarakat Provinsi Bengkulu pada umumnya lebih memilih berobat jalan ke fasilitas kesehatan seperti praktek dokter/bidan dan puskesmas/pustu, yakni masing-masing sebanyak 52,11 persen dan 23,57 persen. Sementara itu, persentase penduduk yang berobat ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik cenderung sedikit, yakni hanya sebanyak 10,67 persen ke klinik/praktik dokter bersama; 7,31 persen ke rumah sakit pemerintah;

dan 6,63 persen ke rumah sakit swasta. Di sisi lain, ternyata masih ada sekitar 1,88 persen penduduk yang lebih memilih berobat ke praktek pengobatan tradisional ketika mengalami keluhan kesehatan.



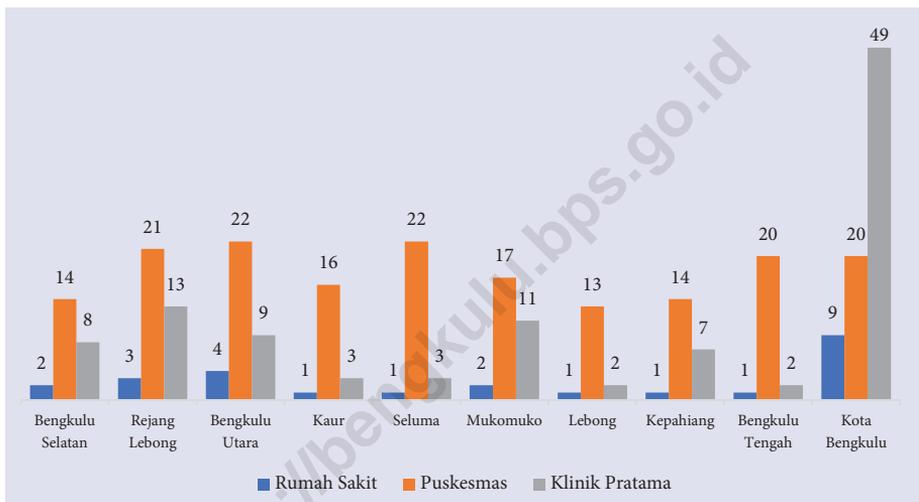
Catatan : UKBM terdiri dari Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu 2023

Gambar 3.3 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat Jalan di Provinsi Bengkulu, 2023

Menurut teori klasik H. L. Bloom menyatakan bahwa ada 4 faktor yang memengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu: 1) gaya hidup (*life style*); 2) lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya); 3) pelayanan kesehatan; dan 4) faktor genetik (keturunan). Keempat determinan tersebut saling berinteraksi dan memengaruhi status kesehatan seseorang. Dari sisi pelayanan kesehatan yang baik, setidaknya ada 2 elemen penting dalam menunjang pembangunan di bidang kesehatan, yakni tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai dan tersebar merata sehingga mudah diakses oleh masyarakat serta keberadaan tenaga kesehatan yang mumpuni dan memadai.

Penyediaan fasilitas kesehatan merupakan input penting dalam keberhasilan pembangunan kesehatan. Fasilitas kesehatan ini antara lain berupa rumah sakit, puskesmas, maupun klinik pratama. Secara umum, pada tahun 2023, fasilitas kesehatan paling banyak memang berada

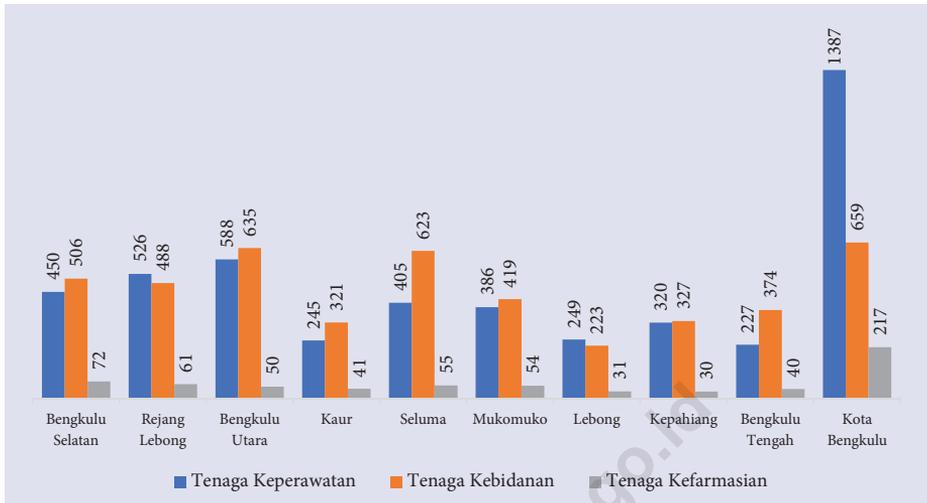
di Kota Bengkulu sebagai ibukota provinsi. Hal ini sudah sewajarnya karena jumlah penduduk pun paling banyak di Kota Bengkulu sehingga butuh lebih banyak fasilitas kesehatan. Rumah sakit umum sudah ada di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu sedangkan rumah sakit khusus hanya ada 2, yakni di Kota Bengkulu dan Kabupaten Mukomuko. Puskesmas dan klinik pratama juga sudah ada di seluruh kabupaten/kota meskipun kuantitasnya berbeda-beda.



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2024

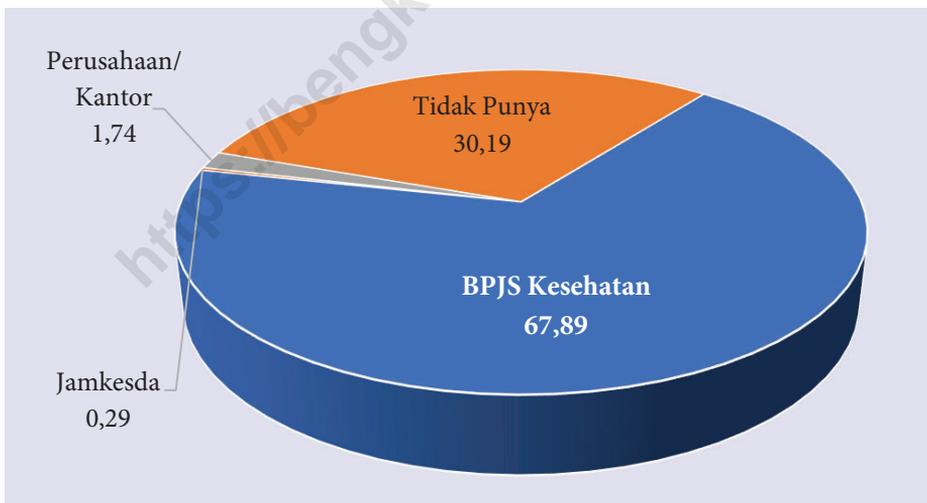
Gambar 3.4 Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik Pratama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2023

Tenaga medis juga menjadi kunci penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan menjadi lebih baik sehingga dapat terwujud masyarakat yang lebih sehat. Penyediaan tenaga medis ini meliputi dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Secara umum pada tahun 2023, jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Bengkulu tercatat ada sebanyak 4.783 tenaga keperawatan, 4.575 tenaga kebidanan, dan 651 tenaga kefarmasian. Seluruh tenaga kesehatan tersebut sudah tersebar di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, namun paling banyak terdapat di Kota Bengkulu. Meskipun demikian, dengan penyebaran tenaga kesehatan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di masing-masing kabupaten/kota sehingga tidak perlu jauh-jauh berobat ke wilayah lain.



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2024

Gambar 3.5 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2023



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu 2023

Gambar 3.6 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan di Provinsi Bengkulu, 2023

Selain penyediaan pelayanan kesehatan yang baik, upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat juga dilakukan melalui kepemilikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Tujuan jaminan

kesehatan adalah untuk menjamin pesertanya memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Dengan adanya jaminan kesehatan diharapkan akan memberikan kemudahan mengakses fasilitas kesehatan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pengobatan ke fasilitas kesehatan saat menderita sakit.

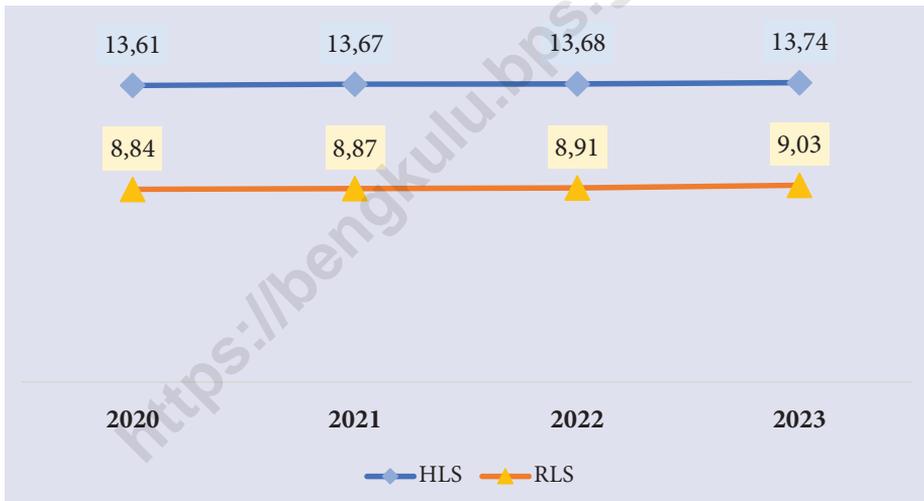
Pada tahun 2023, sebanyak 67,89 persen dari total penduduk Provinsi Bengkulu memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dimana jenis jaminan kesehatan ini adalah yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat (Gambar 3.6). Di sisi lain, ternyata masih ada sekitar 30,19 persen penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap jaminan kesehatan masih perlu ditingkatkan. Namun demikian, persentase penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 35,01 persen. Artinya, sudah ada perbaikan dan kesadaran masyarakat dalam mendapatkan jaminan kesehatan, namun masih perlu ditingkatkan.

3.2 Pendidikan Memperluas Peluang

Pendidikan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar penduduk yang harus dipenuhi untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan dapat memperluas peluang seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih, misalnya melalui pekerjaan yang lebih layak, perilaku yang lebih beradab, dsb. Semakin tinggi pendidikan yang didapatkan oleh seseorang maka akan berdampak pula pada semakin luasnya pilihan-pilihan yang mereka miliki.

Untuk melihat gambaran sejauh mana tingkat pendidikan penduduk di Provinsi Bengkulu dapat menggunakan indikator rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia

25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Semakin tinggi RLS dan HLS menunjukkan semakin lama penduduk mengenyam pendidikan sehingga penduduk memiliki pengetahuan yang lebih baik.



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

Gambar 3.7 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), 2020-2023

Sejak tahun 2020, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Bengkulu selalu meningkat dari tahun ke tahun (Gambar 3.7). Pada tahun 2020, HLS dan RLS Provinsi Bengkulu masing-masing sebesar 13,61 tahun dan 8,84 tahun. Kemudian, pada tahun 2023 HLS dan RLS Provinsi Bengkulu meningkat menjadi masing-masing sebesar 13,74 tahun dan 9,03 tahun. Angka HLS menunjukkan secara rata-rata anak usia 7 tahun yang memasuki jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama

13,74 tahun atau setara dengan Diploma I. Sementara itu, angka RLS berarti secara rata-rata penduduk Provinsi Bengkulu yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,03 tahun atau hingga menamatkan jenjang pendidikan SMP/ sederajat.

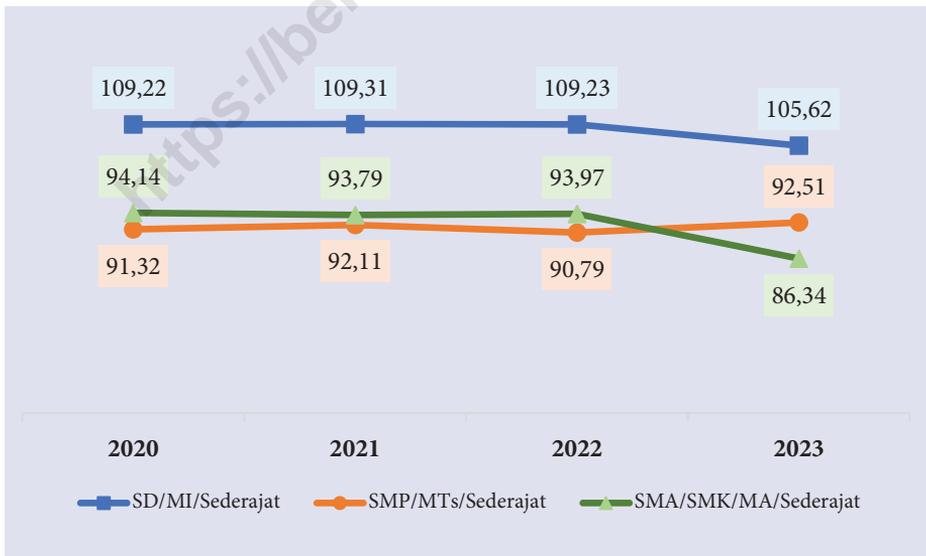
Dalam rangka peningkatan kapabilitas dasar penduduk di bidang pendidikan, pemerintah telah mengupayakan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu. Diantaranya adalah program pendidikan gratis untuk siswa tidak mampu, menekan angka putus sekolah melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk menjamin kesempatan memperoleh pendidikan melalui program penuntasan wajib belajar dua belas tahun. Keberhasilan berbagai program tersebut dapat dilihat salah satunya dari perkembangan tingkat partisipasi penduduk untuk sekolah yang tercermin dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama (SD berusia 7-12 tahun, SMP berusia 13-15 tahun, SMA berusia 16-18 tahun). Salah satu kegunaannya adalah untuk menunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Selain itu, APK dapat menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu.

Gambar 3.8 menunjukkan nilai APK tingkat pendidikan SD/MI/ Sederajat dari 2020 sampai 2023 lebih dari 100 persen. Hal ini karena mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya bisa karena adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Nilai APK lebih dari 100 persen ini juga menunjukkan bahwa di Provinsi Bengkulu mampu menampung penduduk usia SD lebih dari target

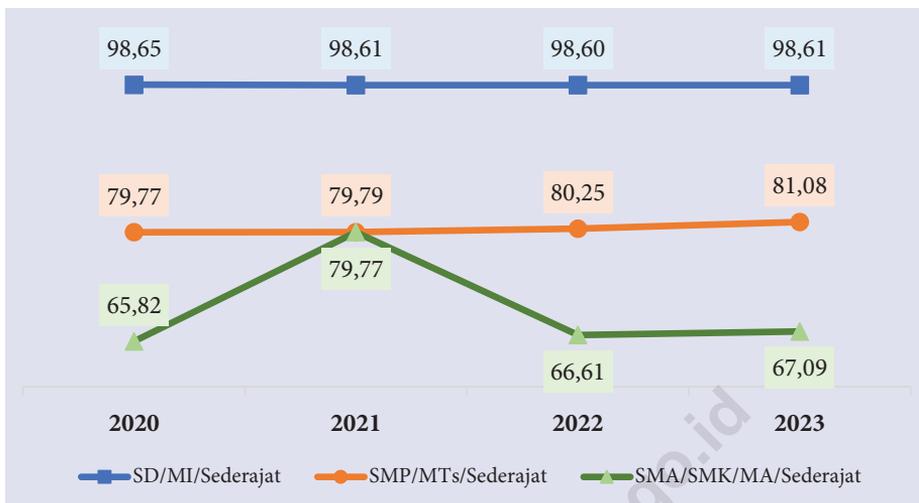
yang sesungguhnya. Namun demikian, terlihat bahwa APK jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat pada tahun 2023 mengalami penurunan, yakni dari 109,22 pada tahun 2020 menjadi 105,62 pada tahun 2023. Artinya, pada tahun 2023 persentase penduduk berusia 7-12 tahun di Provinsi Bengkulu yang bersekolah di tingkat SD sekitar 105,62 persen.

Sebaliknya, APK jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat menunjukkan adanya peningkatan dalam 4 tahun terakhir, yakni pada tahun 2020 sebesar 91,32 dan menjadi 92,51 pada tahun 2023. Artinya pada tahun 2023 persentase penduduk berusia 13-15 tahun di Provinsi Bengkulu yang bersekolah di tingkat SMP/MTs/Sederajat sekitar 92,51 persen. Sementara itu, APK jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat menunjukkan adanya penurunan pada periode 2020-2023 ini, yakni dari 94,14 pada tahun 2020 menjadi 86,34 pada tahun 2023. Semakin tinggi nilai APK menunjukkan semakin tinggi pula partisipasi penduduk dalam menempuh pendidikan.



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2024

Gambar 3.8 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bengkulu, 2020-2023



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2024

Gambar 3.9 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bengkulu, 2020-2023

Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) diartikan sebagai proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya.

Gambar 3.9 menunjukkan secara umum APM jenjang SD hingga SMP cenderung stagnan sejak tahun 2020. APM SD/MI/Sederajat tahun 2020 sebesar 98,65 dan turun pada tahun 2023 menjadi 98,61. Artinya, pada tahun 2023 sekitar 98,61 persen penduduk di Provinsi Bengkulu yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SD/MI/Sederajat. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat, nilai APM meningkat dari 79,77 pada tahun 2020 menjadi 81,08 pada tahun 2023. Artinya, pada tahun 2023 sekitar 81,08 persen penduduk di Provinsi Bengkulu yang berusia 13-15 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SMP/MTs/Sederajat. Selanjutnya, nilai APM jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat merupakan yang paling rendah dibanding jenjang SD dan SMP. Meskipun demikian, nilai APM SMA/SMK/MA/Sederajat

juga cenderung meningkat sejak 2020, yakni dari 65,82 pada tahun 2020 menjadi 79,77 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 67,09. Artinya, pada tahun 2023 sekitar 67,09 persen penduduk di Provinsi Bengkulu yang berusia 16-18 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat.

3.3 Peningkatan Standar Hidup Layak

Dalam konsep pembangunan, manusia memiliki posisi sebagai subjek sekaligus objek pembangunan sehingga sudah semestinya penduduk menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Oleh karena itu, dalam pengukuran kualitas pembangunan manusia juga memasukkan dimensi standar hidup yang layak bagi masyarakat. Hal tersebut untuk melihat apakah hasil dari pembangunan yang dilakukan telah dirasakan oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memiliki kehidupan yang layak. Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya perekonomian. Dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), standar kelayakan hidup masyarakat diproksikan dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Gambar 3.10 menunjukkan perkembangan besarnya pengeluaran per kapita di Provinsi Bengkulu serta laju pertumbuhannya setiap tahun. Dalam kurun waktu 2020-2023, besaran pengeluaran per kapita Provinsi Bengkulu terus mengalami kenaikan, dari 10,38 juta/orang/tahun pada tahun 2020 menjadi 11,17 juta/orang/tahun pada tahun 2023. Secara umum, rata-rata pertumbuhan pengeluaran per kapita Provinsi Bengkulu periode 2020-2023 adalah sebesar 2,49 persen per tahun. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 3,37 persen dibanding tahun 2021.



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

Gambar 3.10 Pengeluaran per Kapita dan Laju Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Provinsi Bengkulu, 2020-2023

Masalah pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah utama penghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka pengangguran akan menyebabkan kemiskinan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan masyarakat. Kemiskinan dapat menyebabkan individu masyarakat kehilangan kesempatan untuk meningkatkan potensi dirinya dan membuat seseorang tidak memiliki banyak pilihan untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai manusia. Karena miskin, seseorang tidak memiliki keleluasaan dalam mengakses fasilitas kesehatan yang memadai, terhambat dalam memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas, terbatas dalam memenuhi berbagai kebutuhan pokok, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, kecenderungan tingkat kemiskinan Provinsi Bengkulu selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan arah penurunan (Gambar 3.11). Pada tahun 2020, ada sebanyak 302,58 ribu atau sekitar 15,03 persen penduduk miskin di Provinsi Bengkulu. Namun, pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun 2020, yakni menjadi 15,22 persen. Hal ini salah satunya diakibatkan adanya Pandemi Covid-19 yang menyerang

perekonomian, dimana banyak kegiatan dibatasi, pekerja dirumahkan, usaha gulung tikar, dsb. Namun, pada tahun 2023 kondisi perekonomian sudah mulai pulih kembali dengan adanya berbagai kebijakan, terutama pelonggaran masa PPMK. Salah satu dampak dari pemulihan ekonomi ini adalah kembali menurunnya persentase penduduk miskin pada tahun 2022 dan 2023.



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, Survei Sosial Ekonomi Nasional Kondisi Maret

Gambar 3.11 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bengkulu (Kondisi Maret), 2020-2023

Selain masalah kemiskinan, tantangan berikutnya dalam pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat adalah masalah pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran memiliki keterkaitan yang cukup erat. Pengangguran mengurangi pendapatan yang akhirnya berdampak pada berkurangnya tingkat kemakmuran yang dapat dicapai seseorang sehingga dapat meningkatkan tingkat kemiskinan.

Salah satu ukuran pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yakni Angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Dari tahun 2020 hingga 2023, TPT Provinsi Bengkulu terus mengalami penurunan, yakni dari 4,07 persen menjadi 3,42 persen.

Pengangguran muncul karena rendahnya tingkat pertumbuhan permintaan terhadap tenaga kerja. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan dalam masyarakat.



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, Survei Angkatan Kerja Nasional Kondisi Agustus

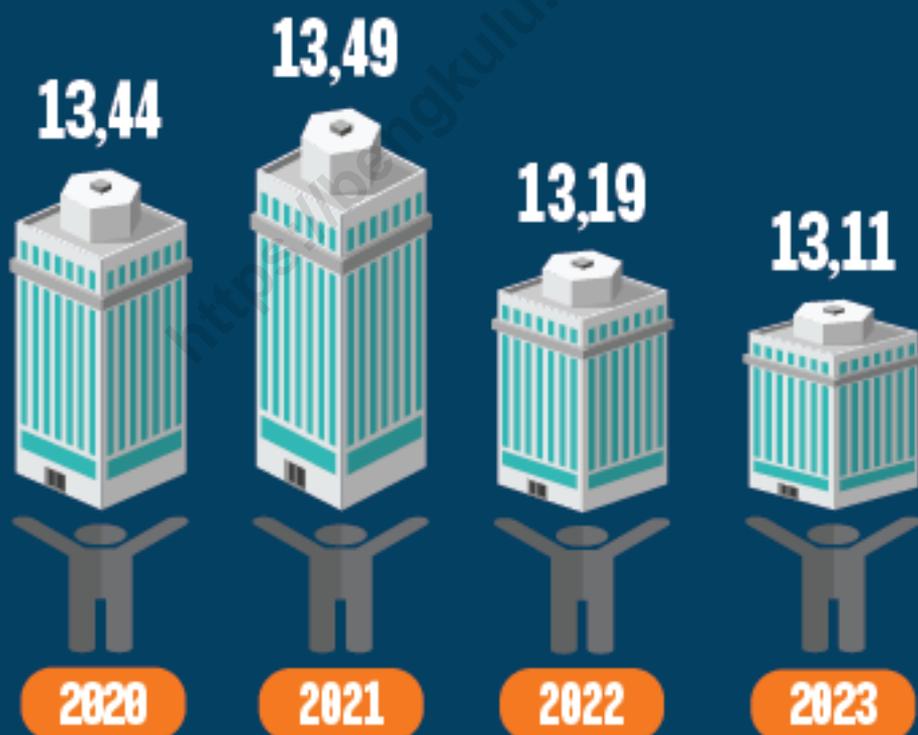
Gambar 3.12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bengkulu (Kondisi Agustus), 2020-2023

BAB 4

Disparitas Pembangunan Manusia



Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah



“ Disparitas pembangunan manusia antar kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu semakin mengecil ”



Bab 4

Disparitas Pembangunan Manusia

Pada hakekatnya pembangunan harus memiliki sifat adil, demokratis, terbuka, partisipatif, dan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari pembangunan manusia yaitu untuk memperluas pilihan-pilihan bagi seluruh masyarakat. Masyarakat harus memiliki akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Dalam mewujudkannya, diperlukan kebijakan yang dapat memperluas pilihan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup.

Namun, proses pencapaian pembangunan yang adil masih mengalami hambatan. Berbagai macam faktor menyebabkan kemajuan pembangunan manusia berbeda-beda. Hal tersebut berdampak pada disparitas pembangunan manusia. Disparitas pembangunan yang muncul harus ditekan. Setiap individu, idealnya mempunyai kesempatan yang sama termasuk kesempatan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Harapannya, kesempatan tersebut merata di semua wilayah, dimana pun mereka berada dan dalam dimensi apapun. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab mengatasi disparitas pembangunan termasuk pembangunan manusia, dimana pemerintah lebih berperan untuk menyediakan fasilitas dan melakukan koordinasi.

Disparitas pembangunan antar daerah bukan merupakan hal yang baru bagi Indonesia, termasuk Provinsi Bengkulu. Kompleksitas berbagai faktor seperti sumber daya manusia, letak geografis, sejarah dan ketidakmerataan sumber daya alam merupakan hal yang masih menjadi kendala menuju konvergensi pembangunan.

4.1 Disparitas Pembangunan Manusia di Provinsi Bengkulu

Secara umum, pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu dapat dilihat dari disparitas pembangunan manusia menurut kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2023, disparitas pembangunan manusia antar kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu direpresentasikan dengan capaian IPM tertinggi yaitu Kota Bengkulu sebesar 83,38 dan IPM terendah yaitu Kabupaten Seluma sebesar 70,27. Dari kedua capaian IPM tersebut, terdapat disparitas pembangunan manusia sebesar 13,11 poin. Meskipun angka disparitas tersebut cukup besar, namun selama kurun waktu empat tahun terakhir (2020-2023), disparitas IPM diantara kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu terus mengalami penurunan.



Catatan : IPM menggunakan UHH hasil *Long Form* SP2020

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023

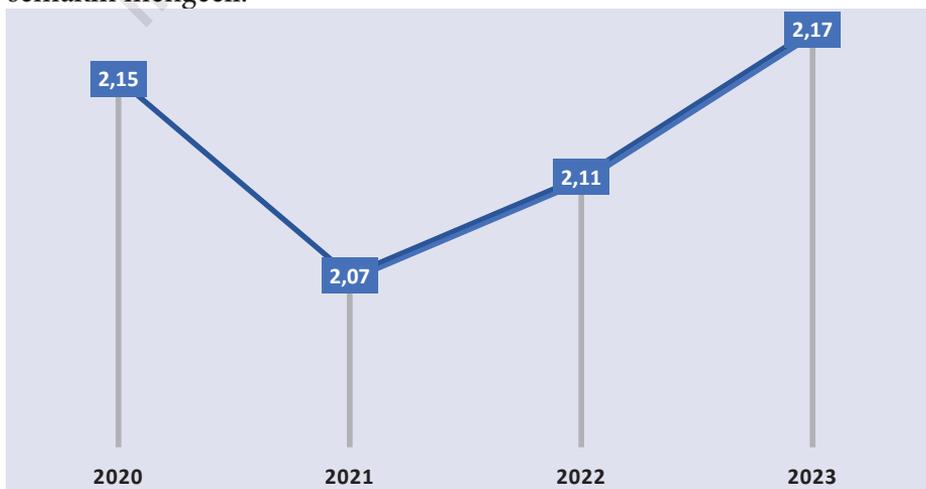
Gambar 4.1 Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Provinsi Bengkulu, 2020-2023

Pada tahun 2020, selisih IPM kabupaten/kota tertinggi dengan terendah sebesar 13,44 dan turun menjadi 13,11 pada tahun 2023. Kesenjangan tersebut terjadi akibat perbedaan yang cukup signifikan antara IPM Kota Bengkulu dan IPM Kabupaten Seluma. Jika dilihat data dari tahun 2020 hingga 2023, penurunan kesenjangan IPM tersebut cukup menggembirakan. Namun demikian, upaya-upaya dalam pemerataan pembangunan masih harus ditingkatkan. Pemerintah tentunya harus mempertimbangkan daerah-daerah yang menjadi prioritas agar

kesenjangan semakin kecil. Jika peningkatan hanya difokuskan pada suatu wilayah tertentu, maka akan memperbesar jurang perbedaan apabila tidak diimbangi pembangunan wilayah lainnya.

a. Selisih Umur Harapan Hidup

Indikator umur harapan hidup yang termasuk dalam dimensi kesehatan Provinsi Bengkulu semakin membaik setiap tahunnya. Hal tersebut tentunya sangat menggembirakan karena kesehatan merupakan salah satu bagian vital dari kehidupan manusia. Di sisi lain, disparitas umur harapan hidup antar kabupaten/kota juga semakin meningkat. Disparitas UHH dapat dilihat dari jarak antara UHH tertinggi dengan terendah. Pada tahun 2020, selisih UHH kabupaten/kota tertinggi dengan terendah adalah sebesar 2,15 naik menjadi 2,17 di tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan pembangunan manusia pada dimensi kesehatan semakin mengalami kesenjangan karena disparitas UHH yang semakin besar. Meskipun demikian, umur harapan hidup setiap wilayah di Provinsi Bengkulu semakin meningkat. Upaya-upaya harus terus dilakukan untuk menciptakan pemerataan pembangunan kesehatan masyarakat agar disparitas kesehatan antar wilayah di Provinsi Bengkulu semakin mengecil.



Catatan : UHH hasil *Long Form* SP2020

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023

Gambar 4.2 Selisih UHH Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Provinsi Bengkulu, 2020-2023

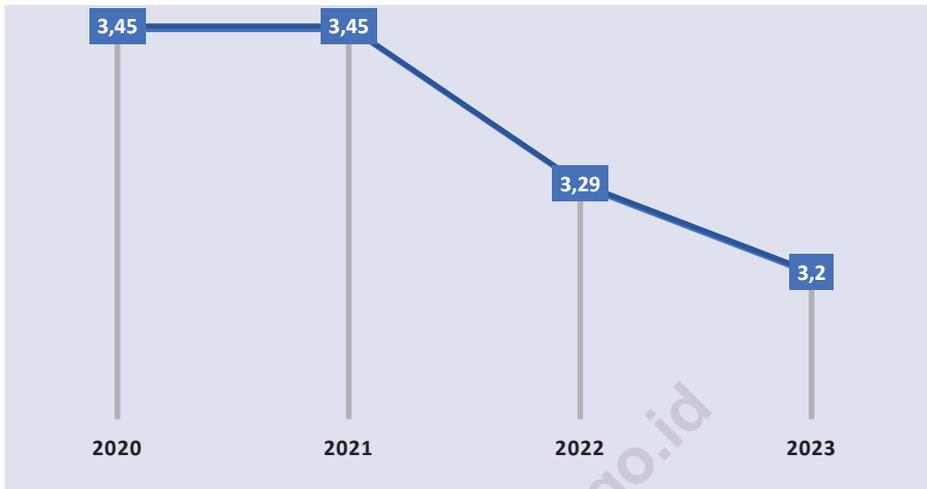
Wilayah dengan UHH tertinggi pada tahun 2023 adalah Kota Bengkulu yaitu sebesar 74,43 tahun. Angka tersebut merepresentasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2023 di Kota Bengkulu diperkirakan mencapai umur 74 tahun. Adapun UHH terendah terdapat di Kabupaten Kepahiang yaitu sebesar 72,26 tahun yang merepresentasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2023 di Kabupaten Kepahiang diperkirakan mencapai usia 72 tahun.

b. Selisih Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Disparitas pembangunan manusia pada dimensi Pendidikan dapat dilihat melalui dua indikator, yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah ini merupakan salah satu indikator input dalam bidang pendidikan. Sedangkan rata-rata lama sekolah merupakan output dari sebuah proses pendidikan.

Disparitas pendidikan yang ditunjukkan dengan rentang angka harapan lama sekolah tertinggi dan terendah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu terus mengalami penurunan. Tahun 2020 selisih HLS kabupaten/kota tertinggi dengan terendah sebesar 3,45 dan turun menjadi 3,20 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan terjadinya perbaikan dan pemerataan indikator HLS kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.

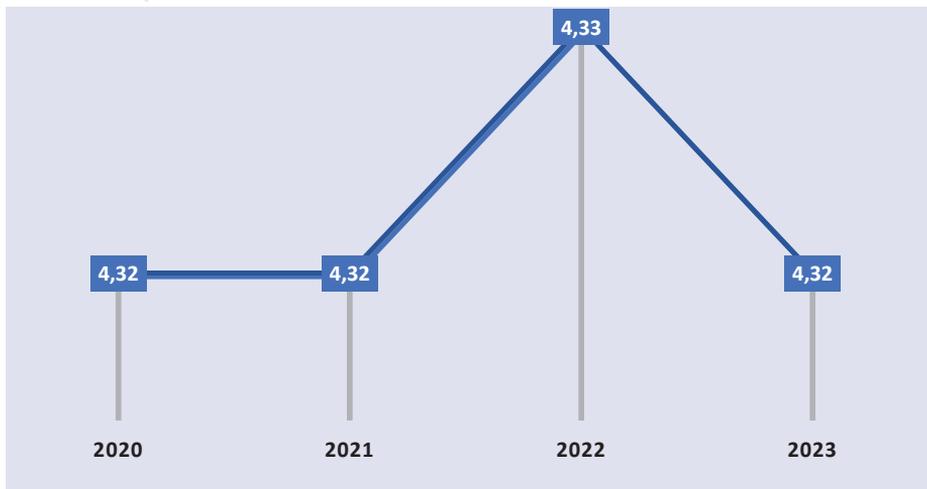
Disparitas harapan lama sekolah di Provinsi Bengkulu dilihat dari perbedaan capaian antara Kota Bengkulu (16,06) dan Kabupaten Mukomuko (12,86). Pada tahun 2023, rata-rata penduduk usia 7 tahun di Kota Bengkulu berpotensi menempuh pendidikan selama 16,06 tahun atau menyelesaikan pendidikan setara DIV/S1. Sementara itu pada tahun yang sama, penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Mukomuko hanya berpotensi menempuh pendidikan selama 12,86 tahun atau menyelesaikan pendidikan setara SMA/ sederajat. Pemerintah daerah harus berupaya mendorong partisipasi masyarakat untuk terus bersekolah.



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023

Gambar 4.3 Selisih HLS Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Provinsi Bengkulu, 2020-2023

Disparitas rata-rata lama sekolah (RLS) tertinggi dengan terendah yang terjadi selama lima tahun terakhir (2020-2023) cukup menunjukkan hal yang positif. Pada tahun 2020, selisih RLS tertinggi dengan terendah adalah sebesar 4,32, sempat mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 4,33 dan kembali mengalami penurunan menjadi 4,32 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan kondisi yang semakin membaik.



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023

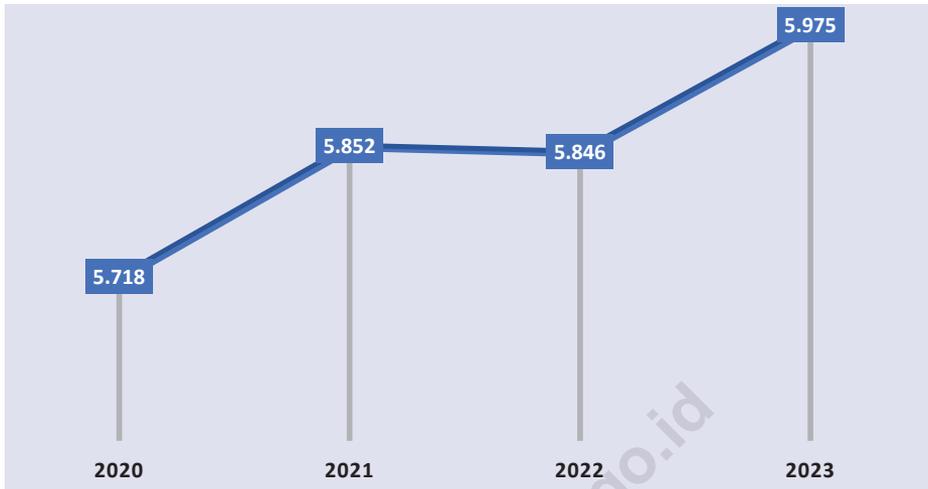
Gambar 4.4 Selisih RLS Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Provinsi Bengkulu, 2020-2023

Diharapkan pada masa masa mendatang, akan terus membaik seiring dukungan pemerintah untuk memperkecil disparitas tersebut. Kesenjangan rata-rata lama sekolah di Provinsi Bengkulu terjadi akibat perbedaan capaian antara Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Tahun 2023, rata-rata penduduk Kota Bengkulu yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 11,83 tahun atau setara kelas dua SMA/ sederajat. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Bengkulu Tengah, rata-rata hanya menempuh pendidikan selama 7,51 tahun atau setara kelas 1 SMP/ sederajat. Kebijakan pemerintah dalam hal pemerataan sarana dan akses pendidikan dapat membantu memperkecil kesenjangan di dunia pendidikan.

c. Selisih Pengeluaran per Kapita

Dimensi standar hidup yang layak menjadi salah satu kunci penting dalam membangun kualitas kehidupan manusia. Dimensi ini diproksi dengan indikator pengeluaran per kapita (d disesuaikan) per tahun. Selama kurun waktu 2020 hingga 2023, selisih pengeluaran per kapita tertinggi dan terendah di Provinsi Bengkulu terus meningkat. Pada tahun 2023 selisih pengeluaran per kapita Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma sebesar 5,975 juta rupiah. Artinya, selisih pengeluaran per kapita Kota Bengkulu sebagai daerah dengan pengeluaran perkapita tertinggi dan Kabupaten Seluma sebagai daerah dengan pengeluaran perkapita terendah mencapai 5,975 juta rupiah per tahun.

Peningkatan pembangunan sebaiknya disertai dengan pemerataan. Jika hanya berfokus pada peningkatan pembangunan ataupun peningkatan pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan maka kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh belum dapat terwujud. Tidak semua masyarakat dapat merasakan fasilitas yang sama sehingga semakin menimbulkan kesenjangan sosial. Pemerintah harus terus berupaya mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang disertai dengan pemerataan (*growth with equity*).



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023

Gambar 4.5 Selisih Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Provinsi Bengkulu, 2020-2023

4.2 Komponen Pembangunan Manusia Tertinggi dan Terendah

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, capaian harapan hidup saat lahir tahun 2023 pada tingkat kabupaten/kota cukup beragam. Kota Bengkulu memiliki umur harapan hidup tertinggi yaitu sebesar 74,43 tahun. Sementara itu, Kabupaten Kepahiang menempati posisi terbawah dengan umur harapan hidup saat lahir sebesar 72,26 tahun. Pertumbuhan umur harapan hidup kedua kabupaten/kota tersebut relatif tidak mengalami perubahan. Secara umum, kondisi tersebut terjadi di semua wilayah mengingat keterkaitan multifaktor yang dapat memengaruhi harapan hidup seseorang saat lahir. Perubahan umur harapan hidup yang signifikan hanya dapat terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama.

Capaian dimensi pendidikan juga menunjukkan variasi pada tingkat kabupaten/kota. Kota Bengkulu masih menduduki peringkat pertama dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah tertinggi masing-masing sebesar 16,06 dan 11,83 tahun. Sementara itu, Kabupaten Mukomuko menjadi daerah dengan angka harapan lama

sekolah terendah di Provinsi Bengkulu yaitu 12,86 tahun dan kabupaten Bengkulu Tengah menjadi daerah dengan rata-rata lama sekolah terendah di Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 7,51 tahun. Menariknya, daerah-daerah dengan nilai terendah tersebut merupakan kabupaten hasil pemekaran. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Tengah masih relatif tertinggal. Selain itu, infrastruktur, luas wilayah dan SDM juga menjadi faktor yang turut memengaruhi.

Sementara itu, dimensi pembangunan manusia dari sisi ekonomi di Provinsi Bengkulu yang diwakili pengeluaran per kapita masih menempatkan Kota Bengkulu pada posisi tertinggi dengan capaian sebesar 14,92 juta rupiah per tahun. Besaran tersebut cukup jauh bila dibandingkan dengan Kabupaten Seluma yang hanya memiliki pengeluaran per kapita sebesar 8,95 juta rupiah per tahun. Banyak faktor yang menyebabkan perekonomian Kabupaten Seluma cenderung tertinggal. Meskipun letak wilayahnya berdampingan dengan Kota Bengkulu, namun ternyata belum mampu mendongkrak perekonomian Kabupaten Seluma.

Dari seluruh dimensi yang membentuk angka IPM, Kota Bengkulu menjadi wilayah dengan angka IPM tertinggi yaitu sebesar 83,38. Sementara itu, Kabupaten Seluma menjadi wilayah dengan angka IPM terendah yaitu sebesar 70,27. Selisih yang cukup jauh antara wilayah dengan IPM tertinggi dengan terendah tersebut memerlukan perhatian yang lebih baik dari pemerintah maupun masyarakat. Berbagai terobosan dan kebijakan oleh pemerintah harus segera dilakukan. Tidak hanya berfokus pada peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu semata tetapi pemerataan pembangunan antar wilayah di kabupaten/kota juga harus lebih diperhatikan. Dengan optimisme dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, perubahan ke arah yang lebih baik diharapkan segera terwujud.

Tabel 4.1 Peringkat Kabupaten/Kota dengan Komponen Pembangunan Manusia Tahun 2023

Peringkat Wilayah Tertinggi Hingga Terendah	Umur Harapan Hidup (UHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Pengeluaran per Kapita	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
2	Mukomuko	Rejang Lebong	Bengkulu Selatan	Lebong	Rejang Lebong
3	Rejang Lebong	Bengkulu Selatan	Rejang Lebong	Bengkulu Utara	Bengkulu Selatan
4	Bengkulu Utara	Bengkulu Tengah	Mukomuko	Mukomuko	Mukomuko
5	Bengkulu Selatan	Seluma	Kaur	Rejang Lebong	Lebong
6	Kaur	Kaur	Kepahiang	Bengkulu Selatan	Bengkulu Utara
7	Seluma	Kepahiang	Lebong	Bengkulu Tengah	Kepahiang
8	Lebong	Bengkulu Utara	Seluma	Kepahiang	Kaur
9	Bengkulu Tengah	Lebong	Bengkulu Utara	Kaur	Bengkulu Tengah
10	Kepahiang	Mukomuko	Bengkulu Tengah	Seluma	Seluma

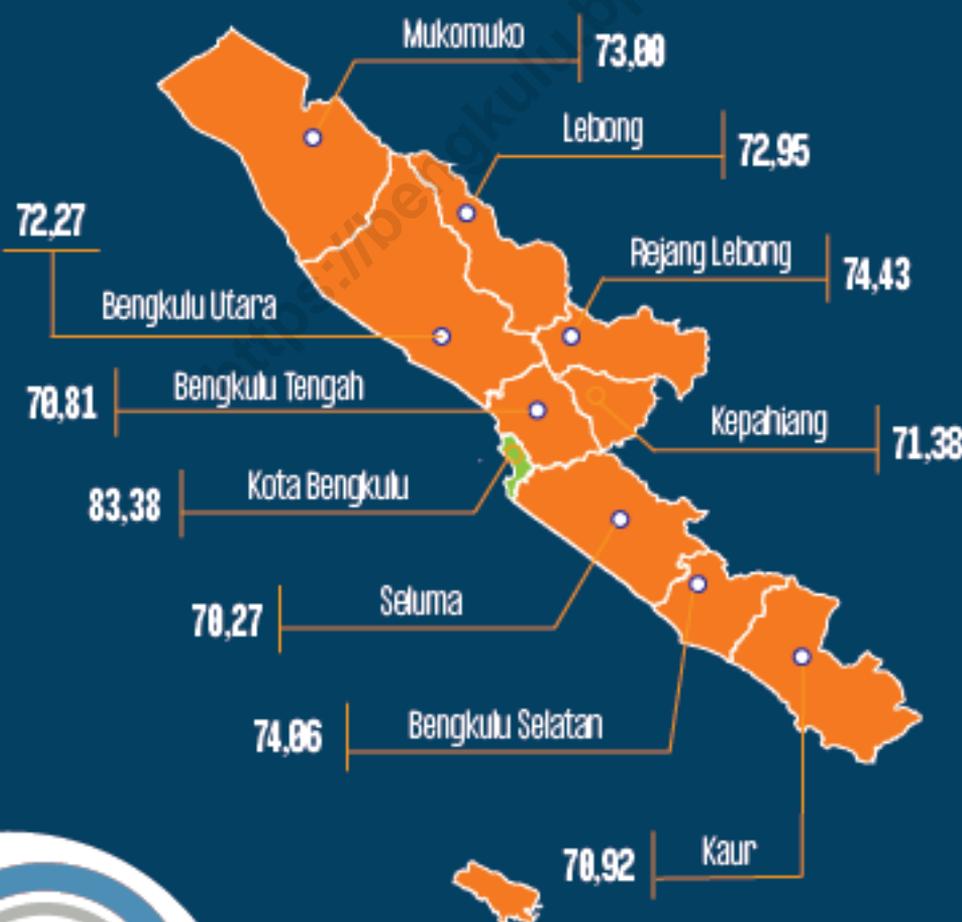
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023

BAB 5

Perbandingan Antar Wilayah



IPM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023



KATEGORI IPM:

Rendah (IPM < 60)

Tinggi (70 ≤ IPM < 80)

Sedang (60 ≤ IPM < 70)

Sangat Tinggi (IPM ≥ 80)



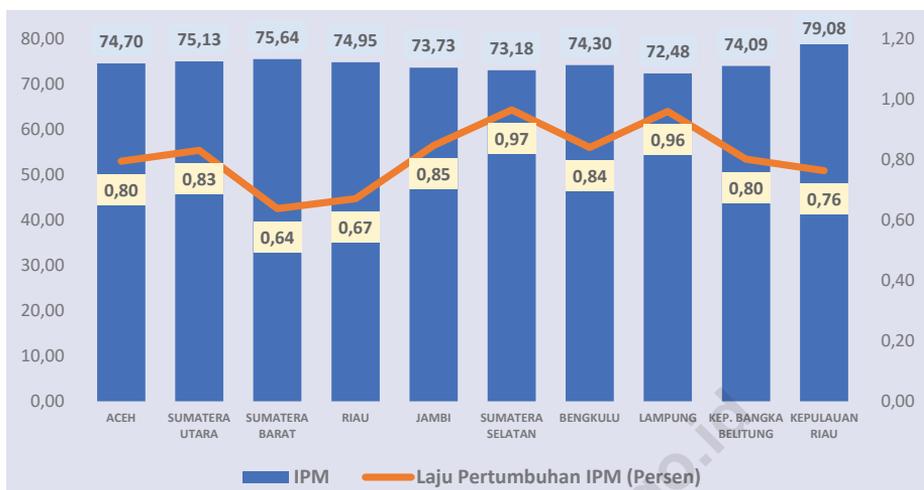
Bab 5

Perbandingan Antar Wilayah

5.1 Perbandingan Pembangunan Manusia Antar Provinsi di Sumatera

Pada tingkat nasional, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2023 mencapai 74,39 yang berarti Indonesia berada pada posisi status pembangunan kategori “tinggi”. Nilai IPM tertinggi dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta, yakni sebesar 83,55 dan menjadi satu dari dua provinsi yang berhasil mencapai IPM berkategori “sangat tinggi”. Sedangkan nilai IPM terendah terdapat di Provinsi Papua, yakni sebesar 63,01. Posisi IPM Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 naik peringkat menjadi urutan ke 15 dari sebelumnya peringkat ke 18 dari total 34 provinsi di seluruh Indonesia. Namun demikian, nilai IPM Provinsi Bengkulu yang sebesar 74,30 masih berada di bawah angka IPM nasional.

Sementara itu, bila dibandingkan dari sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Bengkulu menempati peringkat ke-6 dengan nilai IPM berada di atas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung. Nilai IPM tertinggi di Pulau Sumatera dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau, yakni sebesar 79,08. Hingga saat ini, belum ada satupun provinsi di Pulau Sumatera dengan IPM berkategori “sangat tinggi”. Seluruh provinsi di Sumatera telah berhasil mencapai status pembangunan manusia “tinggi”.



Catatan : IPM menggunakan UHH hasil *Long Form* SP2020

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023

Gambar 5.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Laju Pertumbuhan Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, 2023

Nilai pembangunan manusia yang tinggi bukan merupakan satu-satunya indikator untuk melihat pencapaian pembangunan manusia. Pertumbuhan pembangunan manusia tentunya juga menjadi salah satu indikator penting. Nilai IPM Provinsi Bengkulu selalu tumbuh selama kurun waktu 4 tahun terakhir dan telah mencapai 74,30 pada tahun 2023. Bila dilihat dari sisi angka pertumbuhannya, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, IPM Provinsi Bengkulu mencapai pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 0,84 persen dan terendah pada tahun 2021 sebesar 0,32 persen.

4.2 Status dan Pertumbuhan Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Hasil-hasil pembangunan diharapkan mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat bahkan sampai wilayah yang terpencil sesuai dengan amanat konstitusi yang tercantum dalam Pancasila, yakni “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Pemerataan pembangunan dalam berbagai bidang akan mampu mendorong peningkatan capaian

pembangunan manusia tidak hanya pada level provinsi tetapi juga pada level kabupaten/kota.

Provinsi Bengkulu terbagi ke dalam 9 kabupaten dan 1 kota yang memiliki karakteristik dan kondisi wilayah yang berbeda-beda. Hal tersebut tentu dapat memengaruhi kecepatan pembangunan di wilayah-wilayah tersebut. Dampaknya adalah munculnya kesenjangan pencapaian pembangunan antar wilayah. Kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota masih relatif tinggi dan menjadi persoalan penting untuk ditindaklanjuti.

5.2.1. Status Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Secara umum, perkembangan capaian pembangunan manusia di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu sejak tahun 2020 hingga 2023 semakin meningkat. Pada tahun 2023, angka IPM kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu berada pada kisaran mulai dari 70 - 83. Capaian pembangunan manusia tertinggi terjadi di Kota Bengkulu dan terendah berada di Kabupaten Seluma, masing-masing sebesar 83,38 dan 70,27.

Sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu telah berada pada status pembangunan manusia dengan kategori “tinggi” (capaian $70 \leq \text{IPM} < 80$). Dan kota Bengkulu satu satunya wilayah di Provinsi Bengkulu dengan kategori “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$). Dengan demikian, tidak ada lagi kabupaten/ kota yang masuk kategori “rendah” ($\text{IPM} < 60$) dan kategori “sedang” (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$).

Kota Bengkulu merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Bengkulu yang menunjukkan capaian luar biasa dengan status pembangunan manusia “sangat tinggi” yang sudah diperoleh sejak tahun 2020, dengan nilai IPM sebesar 82,31 pada tahun 2020, 82,49 pada tahun 2021, 82,93 pada tahun 2022, dan menjadi 83,38 pada tahun 2023. Selanjutnya, seluruh kabupaten di Provinsi Bengkulu memiliki capaian pembangunan manusia berstatus “tinggi”.



Catatan : IPM menggunakan UHH hasil *Long Form* SP2020
 Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023

Gambar 5.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Status Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2023

Kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kemajuan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah hendaknya berprinsip pada hakikat pembangunan manusia. Untuk itu, program pembangunan daerah harus direncanakan dengan baik dalam rangka pemerataan kualitas kehidupan manusia.

5.2.2. Pertumbuhan Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

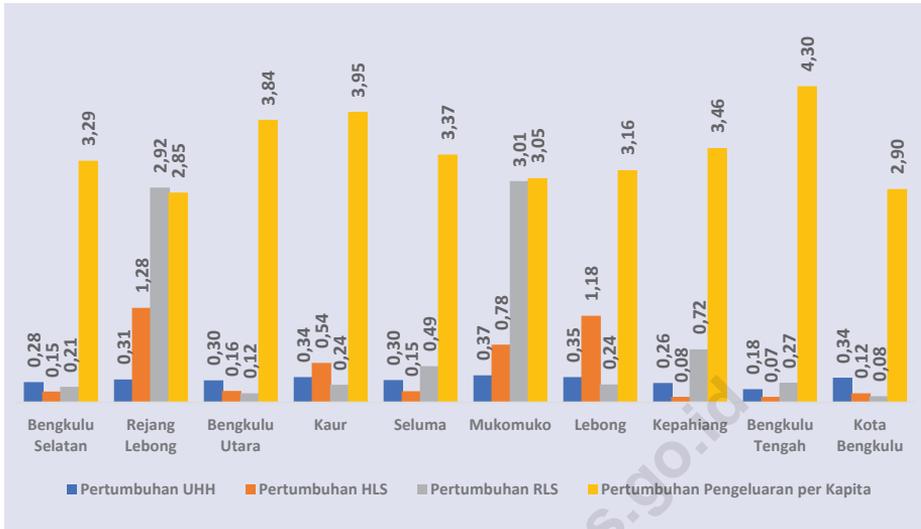
Kecepatan perubahan IPM juga merupakan salah satu fokus dalam pembangunan manusia. Pada metode lama, kecepatan perubahan IPM diukur menggunakan reduksi shortfall. Pada metode tersebut, kecepatan perubahan IPM diukur dengan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai titik IPM ideal sebesar 100. Sedangkan pada metode baru, kecepatan perubahan IPM diukur menggunakan pertumbuhan IPM secara aritmatik.



Catatan : IPM menggunakan UHH hasil *Long Form* SP2020
 Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023

Gambar 5.3 Pertumbuhan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2023 (Persen)

Gambar 5.3 menunjukkan besaran pertumbuhan IPM kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 dengan menggunakan metode baru. Pada tahun 2023, pertumbuhan IPM paling tinggi diraih oleh Kabupaten Rejang Lebong, yakni sebesar 1,21 persen, diikuti oleh Mukomuko (1,18 persen) dan Kaur (0,88 persen). Sementara itu, Kota Bengkulu sebagai wilayah dengan nilai IPM tertinggi memiliki pertumbuhan IPM terendah pada tahun 2023, yakni sebesar 0,54 persen. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan IPM lebih lambat dapat juga disebabkan karena nilai IPM yang sudah tinggi. Sebaliknya, jika capaian pembangunan manusia suatu wilayah masih rendah, maka pertumbuhan pembangunan manusianya cenderung lebih cepat.



Catatan : UHH hasil *Long Form* SP2020

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2023

Gambar 5.4 Pertumbuhan Komponen Penyusun IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2023 (Persen)

Secara umum, pada tahun 2023 pertumbuhan IPM di Provinsi Bengkulu utamanya didorong oleh pertumbuhan pengeluaran per kapita yang tumbuh sebesar 2,90 persen dibanding tahun 2022. Selanjutnya diikuti oleh pertumbuhan Usia Harapan Sekolah (menggunakan hasil *Long Form* SP2020 yaitu sebesar 0,34 persen. Sementara itu, pemicu utama pertumbuhan IPM di kabupaten Rejang Lebong dan Mukomuko sebagai 2 kabupaten dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023 adalah pertumbuhan pengeluaran per kapita yang besar, yakni masing-masing 2,85 persen dan 3,05 persen serta pertumbuhan rata-rata lama sekolah, yakni masing-masing sebesar 2,92 persen dan 3,01 persen.

DAFTAR PUSTAKA

BPS Provinsi Aceh. 2022. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh 2021*. Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh.

BPS Provinsi Bengkulu. 2023. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu 2022*. Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu.

BPS Provinsi Bengkulu. 2020. *Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2020*. Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu.

BPS Provinsi Bengkulu. 2021. *Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2021*. Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu.

BPS Provinsi Bengkulu. 2022. *Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2022*. Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu.

BPS Provinsi Bengkulu. 2023. *Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2023*. Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu.

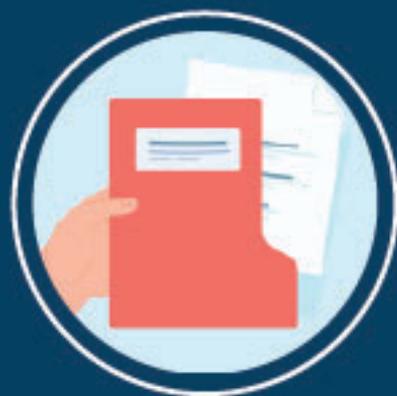
BPS Provinsi Bengkulu. 2020. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu 2020*. Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu.

BPS Provinsi Bengkulu. 2021. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu 2021*. Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu.

BPS Provinsi Bengkulu. 2022. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu 2022*. Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu.

BPS Provinsi Bengkulu. 2023. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu 2023*. Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu.

LAMPIRAN



<https://bengkulu.bps.go.id>



Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2023

Provinsi	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran per Kapita (Ribu/Orang/Tahun)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	73,06	14,38	9,55	10.334	74,70
Sumatera Utara	73,67	13,48	9,82	11.049	75,13
Sumatera Barat	74,14	14,11	9,28	11.380	75,64
Riau	74,18	13,30	9,32	11.448	74,95
Jambi	73,84	13,13	8,81	11.160	73,73
Sumatera Selatan	74,04	12,63	8,50	11.472	73,18
Bengkulu	73,11	13,74	9,03	11.172	74,30
Lampung	74,17	12,77	8,29	10.769	72,48
Kep. Bangka Belitung	73,90	12,31	8,25	13.589	74,09
Kepulauan Riau	74,90	13,05	10,41	14.998	79,08
DKI Jakarta	75,81	13,33	11,45	19.373	83,55
Jawa Barat	74,91	12,68	8,83	11.695	74,24
Jawa Tengah	74,69	12,85	8,01	11.835	73,39
DI Yogyakarta	75,18	15,66	9,83	14.924	81,09
Jawa Timur	74,87	13,38	8,11	12.421	74,65
Banten	74,77	13,09	9,15	12.601	75,77
Bali	74,88	13,58	9,45	14.382	78,01
Nusa Tenggara Barat	72,02	13,97	7,74	11.095	72,37
Nusa Tenggara Timur	71,57	13,22	7,82	8.248	68,40

Lanjutan Lampiran 1

Provinsi	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran per Kapita (Ribu/Orang/ Tahun)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kalimantan Barat	73,71	12,67	7,71	9.810	70,47
Kalimantan Tengah	73,54	12,76	8,73	11.878	73,73
Kalimantan Selatan	73,97	12,86	8,55	12.953	74,66
Kalimantan Timur	74,72	14,02	9,99	13.202	78,20
Kalimantan Utara	73,54	13,20	9,34	9.734	72,88
Sulawesi Utara	73,85	12,96	9,77	11.497	75,04
Sulawesi Tengah	70,66	13,33	8,96	10.149	71,66
Sulawesi Selatan	73,63	13,54	8,76	11.841	74,60
Sulawesi Tenggara	71,79	13,70	9,31	10.117	72,94
Gorontalo	70,50	13,16	8,10	11.069	71,25
Sulawesi Barat	70,76	12,88	8,13	9.718	69,80
Maluku	70,45	14,08	10,20	9.278	72,75
Maluku Utara	70,76	13,74	9,26	8.834	70,98
Papua Barat	68,51	13,34	7,93	8.404	67,47
Papua	68,17	11,15	7,15	7.562	63,01
Indonesia	73,93	13,15	8,77	11.899	74,39

Catatan : UHH menggunakan hasil *Long Form* SP2020

Sumber : Badan Pusat Statistik

Lampiran 2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2020-2023

Provinsi	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Aceh	73,29	73,48	74,11	74,70
Sumatera Utara	73,62	73,84	74,51	75,13
Sumatera Barat	74,29	74,56	75,16	75,64
Riau	73,67	73,89	74,45	74,95
Jambi	72,29	72,62	73,11	73,73
Sumatera Selatan	71,62	71,83	72,48	73,18
Bengkulu	72,93	73,16	73,68	74,30
Lampung	71,04	71,25	71,79	72,48
Kep. Bangka Belitung	72,74	72,96	73,50	74,09
Kepulauan Riau	77,69	77,87	78,48	79,08
DKI Jakarta	81,92	82,25	82,77	83,55
Jawa Barat	72,61	72,96	73,63	74,24
Jawa Tengah	71,88	72,17	72,80	73,39
DI Yogyakarta	79,95	80,22	80,65	81,09
Jawa Timur	73,04	73,48	74,05	74,65
Banten	74,41	74,68	75,25	75,77
Bali	76,52	76,69	77,40	78,01
Nusa Tenggara Barat	70,46	70,86	71,65	72,37
Nusa Tenggara Timur	66,93	67,02	67,63	68,40
Kalimantan Barat	68,76	68,99	69,71	70,47
Kalimantan Tengah	72,62	72,81	73,17	73,73
Kalimantan Selatan	73,09	73,45	74,00	74,66

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Kalimantan Timur	75,94	76,60	77,36	78,20
Kalimantan Utara	71,00	71,57	72,21	72,88
Sulawesi Utara	73,67	74,03	74,52	75,04
Sulawesi Tengah	70,31	70,54	71,01	71,66
Sulawesi Selatan	73,08	73,38	73,96	74,60
Sulawesi Tenggara	71,61	71,82	72,38	72,94
Gorontalo	69,51	69,82	70,62	71,25
Sulawesi Barat	68,40	68,64	69,19	69,80
Maluku	71,34	71,55	72,04	72,75
Maluku Utara	69,30	69,56	70,26	70,98
Papua Barat	65,94	66,11	66,72	67,47
Papua	61,22	61,40	62,16	63,01
Indonesia	72,81	73,16	73,77	74,39

Catatan : UHH menggunakan hasil *Long Form* SP2020

Sumber : Badan Pusat Statistik

Lampiran 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu, 2023

Kabupaten/Kota	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran per Kapita (Ribu/Orang/Tahun)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bengkulu Selatan	72,87	13,65	9,41	10.657	74,06
Rejang Lebong	73,67	14,19	8,80	10.848	74,43
Bengkulu Utara	73,03	12,91	8,11	11.188	72,27
Kaur	72,74	13,14	8,41	9.365	70,92
Seluma	72,71	13,32	8,13	8.949	70,27
Mukomuko	73,71	12,86	8,56	11.075	73,00
Lebong	72,59	12,90	8,26	12.012	72,95
Kepahiang	72,26	13,14	8,36	10.044	71,38
Bengkulu Tengah	72,46	13,46	7,51	10.114	70,81
Kota Bengkulu	74,43	16,06	11,83	14.924	83,38
Provinsi Bengkulu	73,11	13,74	9,03	11.172	74,30

Catatan : UHH menggunakan hasil *Long Form* SP2020

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

Lampiran 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu, 2022

Kabupaten/Kota	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran per Kapita (Ribu/Orang/ Tahun)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bengkulu Selatan	72,67	13,63	9,39	10.318	73,58
Rejang Lebong	73,44	14,01	8,55	10.547	73,54
Bengkulu Utara	72,81	12,89	8,10	10.774	71,76
Kaur	72,49	13,07	8,39	9.009	70,30
Seluma	72,49	13,30	8,09	8.657	69,74
Mukomuko	73,44	12,76	8,31	10.747	72,15
Lebong	72,34	12,75	8,24	11.644	72,35
Kepahiang	72,07	13,13	8,30	9.708	70,85
Bengkulu Tengah	72,33	13,45	7,49	9.697	70,29
Kota Bengkulu	74,18	16,04	11,82	14.503	82,93
Provinsi Bengkulu	72,90	13,68	8,91	10.840	73,68

Catatan : UHH menggunakan hasil *Long Form* SP2020

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

Lampiran 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu, 2021

Kabupaten/Kota	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran per Kapita (Ribu/Orang/ Tahun)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bengkulu Selatan	72,49	13,62	9,27	9.916	70,75
Rejang Lebong	73,17	13,93	8,33	10.323	70,77
Bengkulu Utara	72,57	12,88	8,09	10.410	69,28
Kaur	72,22	13,06	8,38	8.638	67,17
Seluma	72,25	13,29	8,00	8.256	67,03
Mukomuko	73,19	12,74	8,30	10.405	68,64
Lebong	72,04	12,58	8,18	11.317	67,46
Kepahiang	71,87	13,12	8,29	9.377	68,62
Bengkulu Tengah	72,17	13,28	7,48	9.471	67,96
Kota Bengkulu	73,94	16,03	11,80	14.108	80,54
Provinsi Bengkulu	72,65	13,67	8,87	10.487	71,64

Catatan : UHH menggunakan hasil *Long Form* SP2020

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

Lampiran 6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu, 2020

Kabupaten/Kota	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran per Kapita (Ribu/Orang/ Tahun)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bengkulu Selatan	72,47	13,61	9,26	9.837	72,81
Rejang Lebong	72,99	13,83	8,28	10.234	72,51
Bengkulu Utara	72,49	12,87	7,87	10.263	70,81
Kaur	72,12	12,99	8,37	8.593	69,52
Seluma	72,10	13,28	7,99	8.220	68,87
Mukomuko	73,11	12,73	8,29	10.266	71,47
Lebong	71,93	12,57	7,99	11.124	71,20
Kepahiang	71,73	12,90	8,24	9.273	69,91
Bengkulu Tengah	72,17	13,03	7,47	9.392	69,42
Kota Bengkulu	73,88	16,02	11,79	13.938	82,31
Provinsi Bengkulu	72,59	13,61	8,84	10.380	72,93

Catatan : UHH menggunakan hasil *Long Form* SP2020

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

Jl. Adam Malik Km. 8 Kota Bengkulu
Telp. (0736) 394117-394118,
Homepage: bengkulu.bps.go.id
Email: bengkulu@bps.go.id